

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
(STUDI SMA NEGERI 1 KECAMATAN
KUALUH HILIR KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir Dalam Rangka
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Tinggi (M.Pd)
Dalam Bidang Manajemen Pendidikan Tinggi*

Oleh:

MUHAMMAD YUSUF

2020060051



**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
TINGGI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **MUHAMMAD YUSUF**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2020060051**
Prodi/ Konsentrasi : **Magister Manajemen Pendidikan Tinggi**
Judul Tesis : **MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
UNTUK MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN (STUDI SMA NEGERI 1
KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA)**

Pengesahan Tesis

Medan, 17 September 2022

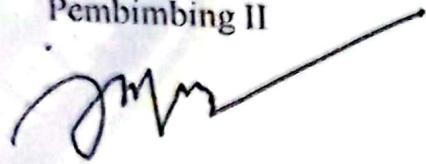
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Akrim, M.Pd

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. Emilda Sulasmi,
M.Pd., CIQnR., CIQaR

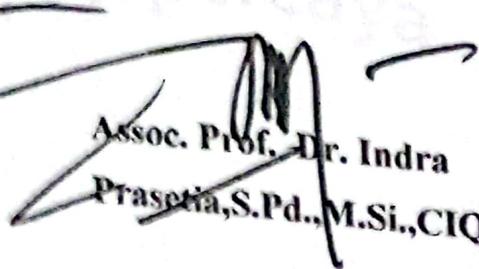
Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. Indra
Prasetia, S.Pd., M.Si., CIQnR

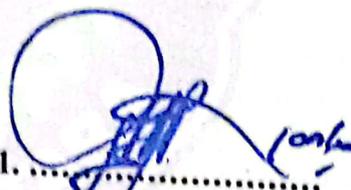
PENGESAHAN
MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN (STUDI SMA NEGERI 1 KECAMATAN KUALUH HILIR
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA)

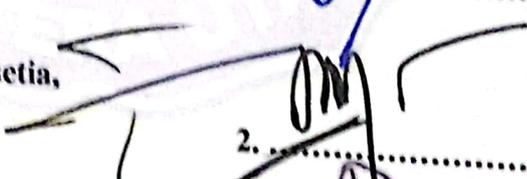
MUHAMMAD YUSUF
2020060051

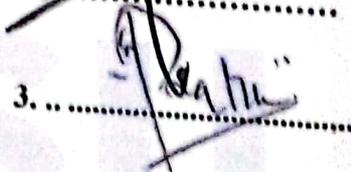
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Di Bentuk Oleh
Program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian, dan Berhak Menyandang
Gelar Magister Manajemen Pendidikan (M.Pd)
Pada Hari Sabtu, Tanggal 17 September 2022

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. Elfrianto, M.Pd
Ketua
2. Assoc. Prof. Dr. Indra Prasetya,
S.Pd., M.Si., CIQnR
Sekretaris
3. Dr. Sri Nurabdiah Pratiwi, M.Pd
Anggota

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI SMA NEGERI 1 KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 17 September 2022

Penulis,



MUHAMMAD YUSUF
NPM: 2020060051

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)

MUHAMMAD YUSUF
NPM : 2020060051

ABSTRAK

Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada saat ini sangat memprihatinkan dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen pengelolaan sekolah, dan manajemen pembiayaan pendidikan. Memajukan pendidikan adalah prioritas utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tempat penelitian ini adalah di SMA Negeri 1 Kualuh Hilir. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, serta observasi. Rancangan anggaran yang dituangkan didalam Rancangan Anggaran Belanja Sekolah (RABS) sesuai dengan budged yang sudah ditentukan dengan menggunakan prinsip hemat, efisien. Pendanaan pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir berasal dari tiga sumber pembiayaan yaitu pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan wali siswa. Pengendalian yang dilakukan adalah pengendalian internal. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir diperlukan strategi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dan Orang Tua. Pengendalian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir menggunakan pengendalian internal yang diawasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai.

Kata Kunci : Manajemen, Pendidikan, Anggaran.

Education Financing Management to Improve Education Quality (Study of SMA Negeri 1 Kualuh Hilir District, North Labuhanbatu Regency)

**MUHAMMAD YUSUF
NPM : 2020060051**

ABSTRACT

Education in North Labuhanbatu Regency is currently very concerning in terms of the quality of Human Resources (HR), school management, and education financing management. Advancing education is the main policy priority of the North Labuhanbatu Regency Government through the North Labuhanbatu Regency Education Office. The type of research used in this study is a type of qualitative research with a descriptive method. The place of this research is in SMA Negeri 1 Kualuh Hilir. The instruments used in this study were interviews, documentation, and observation. The budget plan as outlined in the School Expenditure Budget Plan (RABS) is in accordance with the budget that has been determined using the principle of thrift, efficiency. Education funding for SMA Negeri 1 Kualuh Hilir District comes from three funding sources, namely funding from the central government, provincial government, and student guardians. The control carried out is internal control. To improve the quality of education in SMA Negeri 1 Kualuh Hilir District, a strategy for planning, implementing and evaluating education financing is needed based on the principle of public accountability. Funding for the provision of education is a shared responsibility between the Government, Regional Government, Community, and Parents. The control carried out at SMA Negeri 1 Kualuh Hilir District uses internal controls supervised by the Tanjung Balai City Education Office Branch.

Keywords: Management, Education, Budget.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr .Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada manusia sehingga dapat berfikir dan merasakan segalanya. Satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah keberhasilan penulis menyelesaikan sebuah tesis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen Pendidikan Tinggi (M.Pd) Program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga yaumul akhir kelak, Amin Ya Rabbal Alamin. Saya sebagai penulis tesis ini, sangat berterimah kasih kepada:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Muhammad Arifin, Sh, M. Hum selaku wakil rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I, M, Pd. Selaku wakil rektor II dan sekaligus Pembimbing I saya yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis
4. Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.sos, M.Si. selaku wakil rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Prof. Triono Edy, M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Assoc. Prof. Dr. Muhammad Fitra Zambak, S.T, M,Sc selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Narasumber yang telah banyak memberikan pelatihan seminar penelitian bagi penulis.
7. Assoc. Prof. Dr. Indra Prasetia, S.Pd, M.Si, CIQnR, CIQaR selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Narasumber yang telah banyak memberikan saran dan masukan-masukan bagi penulis.
8. Assoc. Prof. Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd, CIQnR, CIQaR Selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis, sumbangan pikiran yang amat berharga sejak awal pemunculan ide dan kritik demi kritik serta pertanyaan kritis guna mempertajam gagasan telah membuka dan memperluas cakrawala berpikir penulis dalam penyusunan tesis ini.
9. Seluruh Dosen Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan masukan dan membimbing seluruh mata kuliah dengan baik.
10. Kepala sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir ibu Yasma Ariamma, Br. Gusinga, S.Pd dan seluruh guru yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian tesis.

11. Seluruh keluarga peneliti yang telah memberikan motivasi, dukungan finansial, dan doa dari keluarga terutama ayah penulis Sukirman dan ibu Suweni, Kakak Rahayu, Abang Sugi, S.Pd, adik Ali Usman, S.P, adik Siti Umayu, S.Pd, adik Arifin Ilham, adik Maria Ulfa yang telah banyak membantu Penulis.

Penulis menyadari bahwa setiap manusia mempunyai keterbatasan, begitupun dengan saya sebagai penulis. Dalam pembuatan tesis ini mungkin masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ditemukan, oleh karena itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis mengharapkan ada kritik dan saran dari para pembaca sekalian dan semoga proposal ini dapat bermanfaat dari para pembacanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Fokus Penelitian	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Manajemen Keuangan Pendidikan	12
2.1.1.1 Pengertian Pendidikan	14
2.1.1.2 Konsep Dasar Manajemen Pendidikan	17
2.1.1.3 Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan Pendidikan	19
2.1.1.4 Prinsip Manajemen Keuangan dan	
Pembiayaan Pendidikan	21
2.1.1.5 Karakteristik Manajemen Keuangan Pendidikan	22

2.1.2	Manajemen Pembiayaan Pendidikan	23
	2.1.2.1 Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan	23
	2.1.2.2 Prinsip Pembiayaan Pendidikan.....	26
	2.1.2.3 Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan	26
	2.1.2.4 Ruang Lingkup Pembiayaan Pendidikan	27
2.1.3	Pendanaan Pendidikan	29
	2.1.3.1 Pengertian Pendanaan Pendidikan	29
	2.1.3.2 Kebijakan Pendanaan Pendidikan	31
	2.1.3.3 Manajemen Pendanaan Pendidikan.....	33
	2.1.3.4 Bentuk Pendanaan Pendidikan.....	35
	2.1.3.5 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap	
	Pendanaan Pendidikan	36
2.1.4	Pengendalian Pembiayaan Pendidikan.....	37
	2.1.4.1 Definisi Pengendalian	37
	2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan.....	40
	2.1.4.3 Konsep Pengendalian Internal Pendidikan.....	42
	2.1.4.4 Aspek Keperilakuan dari Pengendalian Keuangan	45
2.1.5	Mutu Pendidikan	47
	2.1.5.1 Konsep Mutu Pendidikan.....	47
	2.1.5.2 Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan	51
	2.1.5.3 Faktor Peningkatan Mutu Pendidikan.....	53
	2.1.5.4 Kebijakan Mutu Pendidikan.....	54
2.2	Kerangka Konseptual	56

2.3	Kajian Penelitian Relevan	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		60
3.1	Pendekatan Penelitian	60
3.2	Subjek Dan Objek Penelitian	61
3.3	Tempat Dan Waktu Penelitian	61
3.4	Sumber Data.....	62
3.5	Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data	63
3.6	Analisis Data	65
3.7	Keabsahan Data.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		71
4.1	Deskripsi Hasil Penelitian	71
4.1.1	Sejarah dan Profil SMAN 1 Kecamatan Kualuh Hilir	71
4.1.2	Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	73
4.1.3	Keadaan Sarana dan Prasarana.....	74
4.1.4	Kurikulum SMAN 1 Kecamatan Kualuh Hilir	75
4.1.5	Kerjasama SMAN 1 Kecamatan Kualuh Hilir.....	76
4.2	Temuan Penelitian.....	77
4.2.1	Manajemen Pembiayaan Pendidikan	
	SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir	77
4.2.2	Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 1	
	Kecamatan Kualuh Hilir	79
4.2.3	Pengendalian Pembiayaan Pendidikan	
	SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir	82
4.2.4	Tanggapan Guru terhadap Pembiayaan Pendidikan	
	Di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir	83

4.2.5	Tanggapan Wali Siswa terhadap Pembiayaan Pendidikan	
	Di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir	84
4.2.6	Peningkatan Mutu SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir	85
4.3	Pembahasan Temuan Penelitian.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		96
5.1	Kesimpulan	96
5.1	Implikasi.....	97
5.3	Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA		99
LAMPIRAN - LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Kualuh Hilir adalah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kecamatan Kualuh Hilir secara geografi menempati area seluas 345,48 Km² dengan jumlah penduduk keseluruhannya ± 31964 jiwa yang terdiri dari 6 desa dan 1 kelurahan , di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kualuh Leidong, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Raya, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Aek Kuo dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kualuh Hulu dan Kualuh Selatan.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017/2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki Sekolah Menengah Atas Negeri/ MA dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah 9 (sembilan) sekolah. Kecamatan Kualuh Hilir memiliki jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) Sekolah. Jumlah siswa dari Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2018/2019 adalah 5517 Siswa, sedangkan pada tahun 2019/2020 jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah 5789 siswa. Kecamatan Kualuh Hilir memiliki jumlah 593 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Labuhanbatu Utara Pada tahun 2018/2019 dan pada tahun 2019/2020 Kecamatan Kualuh Hilir memiliki jumlah 612 siswa yang terdiri dari 2 (dua) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). Dari jumlah siswa pada tahun 2018/2019 ke 2019/2020 di Kecamatan Kualuh Hilir mengalami peningkatan kuantitas siswa sebanyak 19 siswa.

Pada Tahun 2021 Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki 36 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdiri dari 11 Sekolah Negeri dan 25 Sekolah Swasta referensi data Kemendikbud tetapi dari jumlah sekolah Negeri tersebut hanya 50 % yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas Negeri, dan masih adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dibawah Standart

Nasional Pendidikan. Bukti dari sekolah tidak memenuhi Standar Nasional adalah sarana prasarana sekolah yang tidak lengkap dan tidak terbukanya musyawarah Manajemen Sekolah dengan Stakeholder lingkungan dalam sekolah dan stakeholder luar sekolah. Dengan kebijakan kepemimpinan yang tidak terbuka dari aspek manajemen pembiayaan sekolah mempunyai dampak bagi mutu sekolah.

Dari pengamatan peneliti untuk Kecamatan Kualuh Hilir pada tahun 2021 siswa yang sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri mengalami peningkatan kuantitas siswa dengan jumlah siswa 719 siswa pada tahun 2020/2021 yang terdiri atas dua sekolah. Manajemen Pembiayaan yang baik merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Djumali dkk (2014: 1), “pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang”. Menurut Sutrisno (2016: 29), pendidikan merupakan aktivitas yang bertautan, dan meliputi berbagai unsur yang berhubungan erat antara unsur satu dengan unsur yang lain. Pendidikan juga memiliki definisi secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa.

Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada saat ini sangat memprihatinkan dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen pengelolaan sekolah, dan manajemen pembiayaan pendidikan. Memajukan pendidikan adalah prioritas utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Salah satu program Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk memajukan pendidikan adalah dengan memberikan Beasiswa MOU bagi siswa khusus Labuhanbatu Utara yang ingin melanjutkan kejenjang Sarjana (S1) dengan memfasilitasi siswa untuk mengikuti beasiswa MOU tersebut ke Universitas Pertanian Bogor (IPB),

Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (UNIMED), dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Manajemen strategi pembiayaan yang peneliti amati disekolah-sekolah yang sering dianggap sebelah mata oleh kepala sekolah dalam menjalankan pelaksanaan pendidikan disekolah menjadikan sebab pendidikan tidak mempunyai tujuan. Penyusunan visi dan misi yang tidak diketahui oleh pendidik dan tidak tepat sasaran menjadikan mutu pendidikan tidak berkualitas. Akibatnya pendidik tidak mengerti sasaran apa yang hendak dicapai dari objek peserta didik yang akan dicapai. Problem seperti ini hendaknya harus sering di sosialisasikan kepala sekolah kepada masyarakat dan lingkungan internal agar seluruh tujuan sekolah memberikan gambaran kepada stakeholder memberikan gambaran untuk semua pihak. Seruluh badged anggaran sekolah yang terdapat pada Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS) dikelola dengan prinsip akuntabilitas, terbuka, hemat dan tepat sasaran.

“Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan serta mutu dari lembaga pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, komponen keuangan dan pembiayaan adalah salah satu indikator lembaga pendidikan mencapai tujuan pendidikan. Tentunya hal ini akan berjalan dengan baik jika menggunakan pengelolaan yang baik atau yang bisa dikatakan dengan manajemen. Manajemen pembiayaan pendidikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan dari proses perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pelaku-pelaku dunia pendidikan menyadari pentingnya peningkatan mutu pembelajaran dengan mengedepankan pencapaian mutu pendidikan melalui peningkatan sumber manusia di sekolah dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan pembiayaan yang kuat (Sallis, 2006: 31)”.

Permasalahan dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah relatif sangat terbatas jumlahnya. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana APBN dalam bidang pendidikan menjadi kendala besar dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional yang berkualitas. Biaya adalah syarat utama untuk meningkatkan mutu pendidikan agar program pengembangan kegiatan

sekolah dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu masalah biaya pendidikan seharusnya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi perlu adanya optimalisasi pembiayaan pendidikan yang bersumber pada lingkungan pendidikan melalui pemberdayaan peran serta masyarakat di dalamnya. Sebagaimana tertuang dalam pedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9 bahwa: Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 47 sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Permasalahan pendidikan mengenai pembiayaan pendidikan adalah masalah makro pendidikan yang berdampak pada mutu pendidikan. Pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab internal sekolah adalah problem yang melatar belakangi rendahnya mutu pendidikan sekolah dan tidak menggunakan prinsip akuntabilitas publik. Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan biaya yang tertuang didalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang tidak diketahui oleh tenaga pendidik disekolah-sekolah dan tidak menggunakan prinsip akuntabilitas publik adalah problem yang sangat berpengaruh didalam manajemen proses didalam sekolah. Sehingga tenaga pendidik dan masyarakat tidak tahu visi dan misi sekolah, bukan sekolah sekedar meluluskan siswa hanya untuk mendapatkan izajah semata. Tetapi sekolah yang baik adalah sekolah yang mempunyai visi dan misi, Standar Nasional Pendidikan yang dikelola dengan baik oleh Kepala sekolah dan personil sekolah. Rencana anggaran dan kegiatan sekolah (RKAS) disusun dengan musyawarah yang melibatkan banyak pihak untuk menentukan biaya, program, dan visi misi sekolah dalam satu tahun anggaran sekolah.

Anggaran pemerintah yang terbatas disekolah membuat sekolah kesulitan mengembangkan program kegiatan yang memberikan batas gerak kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Anggaran dana yang direalisasikan sebesar 50% untuk gaji guru honorer sesuai dengan Permendikbud 6 Tahun 2021 memberikan gambaran kepada sekolah untuk lebih kreatif mengembangkan program dan kebijakan sekolah. Pendanaan yang terbatas dari pemerintah membuat sekolah membuat kebijakan dengan mencari pendanaan yang berasal dari walisiswa untuk kepentingan biaya pembangunan ruang kelas, dan penambahan gaji guru honor. Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dengan persyaratan berstatus bukan aparatur sipil negara, tercatat pada Dapodik, belum mendapatkan tunjangan profesi, dan melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh.

Permasalahan yang terjadi dalam lembaga pendidikan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan antara lain adalah sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang tersendat, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik (*good governance*), sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai penyimpangan yang dapat merugikan pendidikan. Menurut hemat peneliti sekolah menengah atas negeri yang proses pembiayaan hanya bersumber dari pemerintah akan banyak problem sekolah yang membuat mutu sekolah kurang baik. Solusi dari hal tersebut adalah membuat program pengembangan pendidikan yang sumber pembiayaannya berasal dari masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut untuk memajukan program sekolah dan untuk meminimalisir problem yang berkaitan dengan mutu sekolah.

“Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, setiap sekolah dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan

pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Sekolah mempunyai kewenangan untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada keterbatasan dana (Mulyasa, 2005:48)".

Pada tahun 2021 di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 11 (sebelas) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) memiliki manajemen pembiayaan pendidikan yang tidak maksimal, hal ini berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Banyak sekali kesenjangan yang terjadi dilapangan dengan kenyataan adalah Manajemen Pembiayaan yang tidak sesuai regulasi dari aspek perencanaan (Budgeting), Pelaksanaan (Implementation), dan Pertanggung-jawaban (Auditing). Dari manajemen pembiayaan yang tidak baik akan berdampak pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi Pengelolaan, Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Standar Proses. Contoh kasus permasalahan sekolah jika Manajemen Pembiayaan Pendidikan tidak baik adalah Sarana dan Prasarana sekolah yang tidak ada dan mencukupi, gaji guru yang dibawah standar dan tidak tepat waktu, Manajemen Pengelolaan yang carut-marut. Contoh ilustrasi tersebut ditemukan peneliti di Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga menjadi prablematika peneliti. Peneliti menilai contoh ilustrasi tersebut membuat mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) menjadi tidak baik.

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan (Daerah) berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh tingkat akuntabilitas, perlu dilakukan pengawasan yang disesuaikan dengan jenis akuntabilitas yang ingin dicapai. Pendidikan sebagai suatu sistem terbuka tidak lepas dari masalah, baik masalah mikro ataupun masalah makro. Masalah mikro, yaitu masalah yang timbul dalam komponen komponen yang terdapat dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem, antara lain masalah kurikulum, masalah pendidikan, administrasi pendidikan dan sebagainya. Masalah makro, yaitu masalah yang muncul dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem sistem lainnya yang lebih luas didalam seluruh kehidupan manusia, antara lain

masalah kurang meratanya pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, masalah efisiensi, relevansi dan lain lain. Berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, guru dianggap sebagai sumber dari permasalahan tersebut, sehingga dengan mengidentifikasi permasalahan pendidikan kita mengetahui letak permasalahan yang sebenarnya dan berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Pengendalian pembiayaan pendidikan adalah strategi pemerintah merealisasikan anggaran guna tepat sasaran sampai keobjek tujuan. Perlu kerjasama lembaga pendidikan dengan stakeholder yang lain agar tujuan pembiayaan yang direalisasikan pemerintah dapat tercapai. Pengawasan yang baik dari dinas pendidikan memberikan gambaran kepada lembaga pendidikan agar pembiayaan dapat dikelola dengan baik. Manajemen pembiayaan yang baik dapat memberikan stimulus kepada sekolah tentang program dan kegiatan untuk menunjang kualitas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengawasan dana pendidikan yang baik oleh lembaga pengawas keuangan pendidikan memberikan dukungan tentang program pendidikan bisa tercapai dengan tetap sasaran. Strategi pengendalian yang dilakukan pemerintah agar penyelewengan dana dapat dikurangi dapat meningkatkan kinerja guru dan stakeholder didalam sekolah memberikan prestasi kepada peserta didik untuk dapat meningkatkan prestasi.

Faktor yang menentukan keberhasilan dari peserta didik, mulai dari sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi orang tua, peran pendidik, lingkungan belajar, lingkungan keluarga, faktor psikis dari peserta didik dan masih banyak faktor yang lainnya. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik yang paling berperan adalah pendidik dalam hal ini adalah guru. Guru yang notabene sebagai pengayom dan pemberi contoh bagi siswanya sangatlah penting sebagaimana diketahui bahwa semboyan guru “digugu lan ditiru” yang artinya orang yang dipercaya dan diikuti sebagai teladan. Kepercayaan yang diberikan kepada guru inilah yang hendaknya menjadi penyemangat dan stimulus agar guru selalu meningkatkan mutu dan profesionalismenya.

Berbicara mengenai mutu pendidikan, akan berkaitan langsung dengan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan. Pengelolaan belajar mengajar disekolah sangat berarti dalam menentukan keberhasilan siswa. Dalam hal ini sekolah berperan penting dalam menciptakan siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta memiliki nilai religius dan nilai sosial yang tinggi. Dengan demikian sekolah adalah agen sosial yang harus diperhatikan dalam hal proses pembelajarannya. Mutu keluaran dipengaruhi mutu masukan dan mutu proses. Dari fakta dilapangan yang ditemukan peneliti di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara permasalahan Manajemen Pembiayaan, Standart Proses, standart pengelolaan, standar sarana dan prasarana, berpengaruh dengan kualitas sekolah dan mutu pendidikan di Kecamatan Kualuh Hilir. Dalam meningkatkan mutu lulusan diperlukan dukungan yang kuat dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan. Dari sekian banyaknya kriteria untuk meningkatkan mutu lulusan tidak terlepas dari biaya dalam terselenggaranya proses pendidikan. Oleh karena itu, dalam pembiayaan pendidikan dengan dana sebagai penunjang peningkatan mutu pendidikan diperlukan pengelolaan yang terencana agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai dengan baik, namun salah satu tujuan pelaksanaan manajemen pembiayaan adalah untuk mendukung kelancaran kegiatan sekolah secara efektif dan efisien.

Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus menerus akan menjadi perbincangan dalam pengelolan/ manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai. Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh stakeholder pendidikan. Koswara dan Triatna (2010, hal 275) menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu dilihat dari sisi input, output maupun outcome. Input pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, peserta didik yang bermutu, kurikulum yang bermutu, dan beberapa aspek pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. Outpun pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang

disyaratkan. Dan outcome pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi atau terserap kepada dunia usaha atau dunia industri.

Dari uraian diatas peneliti tertarik meneliti Tesis ini dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Study SMA Negeri 1 Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Kebijakan kepemimpinan yang tidak terbuka dengan stake holder dalam dan luar sekolah mengenai manajemen pembiayaan sehingga sekolah mempunyai dampak bagi mutu sekolah.

- a) Pembiayaan pendidikan yang diberikan pemerintah sangat terbatas sehingga sekolah sulit mengembangkan program meningkatkan mutu pendidikan.
- b) Sumber pendanaan pendidikan tidak ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.
- c) Supervisi Pembiayaan pendidikan yang tidak dikontrol dengan baik, dan hal tersebut bisa meningkatkan penyelewengan anggaran pendidikan.
- d) Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang tidak diketahui oleh tenaga pendidik disekolah-sekolah dan tidak menggunakan prinsip akuntabilitas publik sehingga sangat berpengaruh didalam manajemen proses internal sekolah.

1.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini mempunyai alur penelitian dan pembahasan tidak melebar, perlu peneliti memberikan batasan masalah penelitian, batasan penelitian ini adalah

- a) Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah Pembiayaan yang meliputi perencanaan anggaran (budgeting), pelaksanaan (implementation involves

accounting), dan evaluasi pembiayaan pendidikan, yang termaksud konsepsi manajemen keuangan pendidikan.

- b) Pendanaan dan pengendalian pembiayaan pendidikan adalah yang termaksud kedalam sistem audit keuangan pendidikan.
- c) Mutu Pendidikan adalah Mutu pendidikan yang mencakup Standar Nasional Pendidikan di SMAN 1 Kecamatan Kualuh Hilir.

1.4 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah penelitian ini adalah

- a) Bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- b) Bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan yang baik dari aspek pendanaan pendidikan (Education Punding) di SMAN 1 Kecamatan Kualuh Hilir untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- c) Bagaimana pengendalian pembiayaan pendidikan (auditing) di SMAN 1 Kecamatan Kualuh Hilir untuk meningkatkan mutu pendidikan.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian maka peneliti menyimpulkan tujuan penelitian ini adalah

- a) Untuk mengetahui manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- b) Untuk mengetahui manajemen pembiayaan pendidikan yang baik dari aspek pendanaan pendidikan (Education Punding) di SMAN 1 Kecamatan Kualuh Hilir untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- c) Untuk mengetahui pengendalian pembiayaan pendidikan (auditing) di SMAN 1 Kecamatan Kualuh Hilir untuk meningkatkan mutu pendidikan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan-temuan yang merupakan masukan bagi sekolah untuk menciptakan suasana baru dalam memperbaiki manajemen pembiayaan pendidikan khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Manfaat yang mungkin diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a) Bagi pengembangan keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi kajian dan pengembangan keilmuan, khususnya dibidang manajemen pendidikan yang terkait dengan pembiayaan.
- b) Bagi peneliti, dapat memberikan nilai tambah dalam menganalisis berbagai permasalahan, dalam pengelolaan manajemen sekolah, khususnya manajemen pembiayaan pendidikan kaitannya dengan mutu sekolah dan akan menambah wawasan berfikir dalam upaya memahami serta memecahkan persoalan pendidikan yang senantiasa menjadi tuntutan yang terus berkembang yang tiada berhenti dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan dunia pendidikan.
- c) Bagi peneliti, memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu yang relevan dengan bidang yang telah ditekuni, yaitu manajemen pendidikan.
- d) Bagi sekolah, Sebagai bahan acuan bagi sekolah pentingnya manajemen pembiayaan, pendanaan, dan pengendalian pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di indonesia.
- e) Bagi praktisi, sebagai bahan masukan bagi praktisi pendidikan bahwa tujuan pendidikan nasional akan tercapai bila didukung oleh mutu sekolah yang baik dengan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik pula.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Manajemen Keuangan Pendidikan

Pengertian sistem menurut W. Gerald Cole dalam bukunya *Accounting system* yang dikutip oleh Drs. Zaki Baridwan adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi. Jadi, berdasarkan pada pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Pada dasarnya manajemen keuangan mempunyai dua unsur kata yaitu “manajemen” dan “keuangan”. Kata manajemen (*management*) mempunyai beberapa arti, tergantung pada konteksnya. Menurut (Arianti, 2003) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, kepemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan merupakan suatu proses kegiatan keuangan untuk mendapatkan dana dan pengelolaan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan didefinisikan menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut: Menurut Horne and Wachowicz (2013), manajemen keuangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan memperoleh aset, pendanaan dan pengelolaan aset untuk mencapai tujuan umum.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengertian keuangan menurut Lawrence J. Gitman (2003) dalam bukunya *Principles of Managerial Finance* menyatakan bahwa *finance can be defined as the art and science of managing money*. Keuangan dapat didefinisikan

sebagai seni dan ilmu pengetahuan dari pengelolaan uang. Keuangan merupakan ilmu dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dalam sebuah organisasi. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan terhadap dana yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen keuangan menurut beberapa pendapat para ahli, yaitu:

1. Menurut Maysarah manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan. (Maysara).
2. Menurut Husnan Suad manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi-fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu (Husnan) Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah proses pengaturan terhadap fungsi-fungsi keuangan oleh ketatausahaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pertanggungjawaban keuangan.

Manajemen keuangan merupakan konsep atau bagian terpenting dalam proses bisnis suatu organisasi. Ruang lingkup manajemen keuangan berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan, penggunaan atau pengalokasian dana serta untuk mengelola aset yang dimiliki perusahaan sesuai tujuan perusahaan. Pada dasarnya manajemen keuangan adalah suatu kegiatan yang didalamnya melibatkan suatu perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pemeriksaan, pengalokasian dan pengendalian dana yang dimiliki oleh perusahaan. Kegiatan ini merupakan tugas dari manajer keuangan.

Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan uang (money) untuk menggerakkan semua sumber daya (resource) yang dimilikinya. Dalam pemahaman Rofiq, A. (2017) menjelaskan bahwa uang termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. keuangan pendidikan (financial management education), anggaran pendidikan (education budget), pendanaan pendidikan (education funding), dan pembiayaan pendidikan (financing education).

2.1.1.1 Pengertian Pendidikan

Sedangkan menurut M.J. Langeveld, pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain, dengan kata lain membimbing anak mencapai kedewasaan. Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan adalah pemberian pengalaman yang diberikan kepada seorang anak agar anak menjadi dewasa. Namun yang ingin di bahas dalam pengertian ini adalah pendidikan sebagai objek atau tempat berlangsungnya pendidikan itu sendiri yaitu lingkungan sekolah.

Berdasarkan pada beberapa pengertian sistem, manajemen keuangan, dan pendidikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem manajemen keuangan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan dengan mengembangkan dan mengelola sumber keuangan dan potensi-potensi yang dimiliki dalam sistem pendidikan tersebut secara efektif dan efisien di lingkungan sekolah. Manajemen keuangan termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memerlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap dana tersebut.

Dalam (Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20, 2003) pasal 1 ayat 1, diungkapkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah “usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak „mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau kegiatan program pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Depdiknas merumuskan tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal berdasarkan prioritas kegiatan pendidikan yang ditetapkan.
- 2) Mensinergikan berbagai kegiatan antarbidang secara harmonis untuk mencapai tujuan- tujuan pendidikan.
- 3) Mengembangkan perilaku transparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatan keuangan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas dalam menggali sumber- sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung- jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. (Undang- undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20, 2003) pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip transparansi (keterbukaan sumber keuangan, jumlah, rincian penggunaan, pertanggungjawaban, dsb), akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan), efektivitas (kualitas outcome sesuai rencana), dan efisiensi (kuantitas hasil sangat bagus perbandingan yang terbaik antara masukan/input (pikiran, waktu, dan biaya) dan keluaran/output/hasil). Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dalam (Horngren, 1993) Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dinyatakan pada UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 46 ayat (1) yaitu pendanaan pendidikan menjadi

tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Pembiayaan di Sekolah Swasta

Pembiayaan Pendidikan dari Swasta : Biaya pendidikan dari swasta yang dimaksud adalah biaya yang disumbangkan masyarakat (individu, perusahaan, lembaga nonpemerintah, dan lainnya) ke sekolah. Misalnya, PT Pertamina, Sampoerna Foundation memberi beasiswa bagi anak-anak berprestasi, dan sponsor lainnya. Pembiayaan Pendidikan dari Masyarakat : Biaya pendidikan dari masyarakat meliputi: sumbangan orang tua siswa, sumbangan perusahaan/swasta, dan lainnya. Sumbangan orang tua siswa yang dimaksud adalah dana yang disumbangkan langsung ke sekolah oleh orang tua siswa atau dikenal dengan dana Komite Sekolah. Dana tersebut terdiri atas Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan iuran atau dana Operasional Pendidikan (DOP).

b. Pembiayaan di Sekolah Negeri

Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Pusat : Menurut (“Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah”), maka pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada pemkab/pemkot. Aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, khususnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut, (“UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,” n.d.) selain DAU, dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah adalah dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber penerimaan daerah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pinjaman daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota: Biaya pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota yang diterima digunakan untuk belanja administrasi umum yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan pemeliharaan. Biaya dari pemkab/pemkot lainnya adalah dana beasiswa untuk siswa dan dana subsidi untuk penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional.

2.1.1.2 Konsep Dasar Manajemen Pendidikan

Secara umum, pengertian manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengatur sesuatu proses yang sedang dikerjakan baik individu maupun kelompok. Manajemen dinilai sangat penting dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan atau ditentukan baik individu atau secara kelompok. Manajemen bisa diartikan sebagai seni dalam mengatur dan melaksanakan. Menurut Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Suatu proses yang dimaksud adalah suatu usaha yang sistematis dalam melakukan suatu pekerjaan. Manajemen dinilai sangat penting dalam hidup manusia, terlebih dalam mengatur kehidupan pribadi dan juga saat menjadi bagian dalam suatu organisasi dalam sekolah, kampus, kantor, dan juga dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya, apabila manusia sebagai individu sangat memahami pengertian dan maksud dari manajemen, kaidah-kaidah serta konsep-konsep yang ada didalamnya maka suatu proses dalam pengerjaannya akan terasa lebih tertata, efektif, dan efisien.

Sedangkan dalam dunia pendidikan, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 ayat 1, yaitu “pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara”.

Pendidikan nasional harus dikelola secara tepat agar tujuan atau target dapat tercapai secara efektif dan efisien. karena itu, pengelolaan pendidikan diperlukan administator yang dapat berkinerja secara maksimal guna meningkatkan kualitas lulusan yang diharapkan oleh masyarakat. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilai

usaha-usaha pendidikan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan definisi yang lainnya adalah suatu bentuk kerja sama dan antar pihak pada sektor pendidikan untuk mencapai suatu target dalam pendidikan.

Sedangkan, pengertian manajemen menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Mulyasa : manajemen pendidikan merupakan sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan, tenaga pendidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana, sarana prasarana pendidikan, tata laksana dan lingkungan pendidikan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

George R. Terry : manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan juga untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dan juga sumber daya yang lainnya.

Engkoswara : manajemen pendidikan dalam arti luas adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang kondusif bagi manusia yang terlibat didalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam manajemen pendidikan terdapat tujuan yang harus dipelajari dan diketahui, antara lain:

1) Efektifitas

Melalui fungsi manajemen yang baik dan dilakukan secara berkelanjutan, maka segala sesuatu akan terasa lebih efektif. Hal ini dianggap sangat penting untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.

2) Efisiensi

Efisiensi pendidikan adalah untuk mencapai suatu tujuan harus memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, baik waktu, biaya, tenaga dan sarana yang ada.

3) Kualitas

Merupakan suatu penilaian atau penghargaan yang diberikan pada suatu barang atau jasa berdasarkan pertimbangan bobot dan kinerjanya. Kemudian, dengan manajemen yang baik akan tercipta kualitas yang bermutu, relevan, akuntabel serta meningkatkan citra positif pendidikan.

4) *Supporting System*

Sebenarnya hal yang paling penting dan utama itu tidak boleh melupakan

5) Produktivitas

Adalah suatu usaha perbandingan antara hasil yang diperoleh (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*).

6) Soebagio Atmodiwirio

Manajemen pendidikan adalah suatu proses untuk melakukan perencanaan, melakukan organisasi untuk memimpin dan untuk melakukan pengendalian. Karena manajemen ini dilakukan dalam dunia pendidikan maka fokusnya dilakukan dalam dunia pendidikan itu sendiri untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kemudian, manfaat manajemen dalam pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) Menjadi pegangan dalam melaksanakan manajemen yang ada
- 2) Menggunakan prinsip kerja efektif dan efisien
- 3) Menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan tugasnya masing-masing

2.1.1.3 Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan Pendidikan

Melalui kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan, kebutuhan pendanaan, pembiayaan kegiatan dan anggaran lembaga pendidikan dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, digunakan untuk membiayai pelaksanaan program lembaga pendidikan secara efektif dan efisien, sekaligus dipertanggungjawabkan untuk memberikan rasa puas pada pihak-pihak yang mendonasikan uang untuk kegiatan lembaga pendidikan. Uraian ini sekaligus memperkuat Untuk itu tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan adalah:

- 1) Meningkatkan penggalan sumber biaya lembaga pendidikan
- 2) Menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan
- 4) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan
- 5) Mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran.
- 6) Membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Meningkatkan partisipasi stakeholders pendidikan dalam pembiayaan pendidikan (Tjandra, W.R., 2006).

Lebih lanjut, Suad Husnan (1992;4) menjelaskan tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan agar para manajer pendidikan dapat menggunakan dan menggali sumber-sumber pendanaan secara memadai dari berbagai pihak untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu, juga ada beberapa tahapan penting yang perlu dilaksanakan, di antaranya tahap perencanaan keuangan (financial plan), penganggaran(budgeting), pelaksanaan pembukuan (accounting) dan tahap penilaian atau auditing, (Thomas. H. Jones,1985;22).

Fokus manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bersifat publik, menurut Abdullah (2011;12) merupakan upaya pengelolaan sumber dana yang tersedia dilembaga pendidikan untuk dapat dipergunakan seefektif mungkin, dalam pengertian bahwa dana (uang) yang tersedia itu bisa dipergunakan untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan perencanaan (budgeting) yang sudah ditetapkan. Tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan ini

menegaskan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi acuan dalam dokumen:

Perencanaan Keuangan dengan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu;

- 1) Penganggaran Keuangan berupa tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan;
- 2) Pengelolaan Keuangan dengan menggunakan dana lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara;
- 3) Pencarian Keuangan, mencari dan mengeksplorasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan;
- 4) Penyimpanan Keuangan berupa mengumpulkan dana lembaga pendidikan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut.
- 5) Pengendalian Keuangan berupa evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan;
- 6) Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan lembaga pendidikan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
- 7) Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan lembaga pendidikan sekaligus sebagai bahan evaluasi;

Aktivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di atas menjadi indikator bagi keberhasilan satuan pendidikan dalam mengelola keuangan dan pembiayaan pendidikan.

2.1.1.4 Prinsip Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan

Kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan perlu memerhatikan sejumlah prinsip, antara lain:

- 1) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku
- 2) Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan lembaga pendidikan

- 3) Keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan
- 4) Transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik
- 5) Penguatan partisipasi publik atau masyarakat.

Di samping itu prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan di Indonesia di atur dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparasi, dan akuntabilitas publik.

2.1.1.5 Karakteristik Manejemen Keuangan Pendidikan

Ada beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, di antaranya:

- 1) Trend pembiayaan pendidikan selalu menunjukkan kenaikan, dimana perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost yang terdiri dari:
 - a) Unit cost lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan;
 - b) Unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda;
 - c) Unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.
- 2) Pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor sumber daya manusia. Dimana pendidikan dapat dikatakan sebagai —human investmentll, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia, yakni pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah, semakin bermutu sekolah tersebut, kecenderungan penggunaan biaya yang besar

semakin menjadi kebutuhan yang realistis dan sebaliknya semakin kecil biaya yang disediakan kecenderungan untuk tidak bermutu semakin menjadi realistis;

- 4) Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum;
- 5) Unit cost rutin komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun sehingga bisa diprediksi dan diestimasi. (Suharti, T., & Nurhayati, I.;2015).

Dengan memahami karakteristik manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, di atas, tentu para manajer keuangan, bendahara, perencana keuangan bisa memproyeksi kebutuhan dan sumber keuangan, pendanaan, dan pembiayaan yang bisa dicarikan dari berbagai pihak yang terkait dengan proses layanan pendidikan yang diselenggarakan dapat dipenuhi kebutuhannya. Sehingga siap memberikan layanan terbaik dan mutu pendidikan yang sesuai dengan harapan segenap stakeholder pendidikan.

2.1.2 Manajemen Pembiayaan Pendidikan

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Konsep manajemen dibangun atas dasar pemahaman yang komprehensif tentang konsep biaya. Nanang Fattah dalam Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini mendefinisikan biaya pendidikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana prasana pendidikan, pengadaan alat-alat pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, dan hal lain yang berkaitan dengan kependidikan. (Samiyah 2016).

Manajemen Pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Secara teoritis konsep biaya pendidikan sama dengan di bidang lain, yaitu lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang lulusan. Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan, mengalokasikan sumber dana dan mendistribusikannya sebagai fasilitas pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Manajemen pembiayaan merupakan keputusan secara keseluruhan aktivitas mengenai usaha dalam memperoleh dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen yang menuntut agar dalam mengelola dana memperhatikan dan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. (Djuwairiyah, Muqit, and Listiana 2021)

Menurut Hasbullah Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. Biaya dalam pengertian ini yaitu jenis pengeluaran baik dalam bentuk barang maupun tenaga untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitik beratkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Unsur biaya adalah hal yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya sangat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan lembaga/organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. (Vladimir 1967)

Menurut Yahya dan Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia., 2012 yang dikutip oleh Mulyono pembiayaan adalah

bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang.

Menurut Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Standar Nasional Pendidikan: PP RI No. 19 Tahun 2005 terdiri atas tiga bagian besar yaitu:

- 1) Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan model kerja tetap.
- 2) Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 3) Biaya personal yang meliputi:
 - a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
 - c) Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang keefektifitasan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasinya yang menuntut kemampuan yayasan pendidikan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Destiani 2019).

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Definisi biaya menurut Supriyono biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara

bahasa, biaya (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. (Dedi Supriadi, 2004) dalam bukunya mendefinisikan biaya sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang, barang, dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).

2.1.2.2 Prinsip Pembiayaan Pendidikan

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pasal 48, yaitu pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Secara garis besar ada lima prinsip dalam manajemen pembiayaan yaitu: Akuntabilitas (accountability), proses manajemen pembiayaan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, dari mana dana diperoleh dan bagaimana dana dipergunakan untuk kepentingan pendidikan.

- 1) Transparan (Transparency), proses manajemen pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip ini direalisasikan dengan bentuk laporan pengelolaan dana kependidikan yang ada.
- 2) Integritas (Integrity), pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan harus memiliki integritas, baik dari sistem yang dibangun maupun sumber daya manusia yang menjalankan.
- 3) Konsistensi (Consistency), pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkan. Konsistensi ini tetap memperhatikan dinamika dan perkembangan dunia pendidikan dan permintaan masyarakat pendidikan.
- 4) Efektif dan Efisien, pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara efektif, efisien dan fokus pada tujuan yang hendak dicapai. Prinsip ini menjadi indikator produktifitas lembaga pendidikan.

2.1.2.3 Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen diartikan sebagai suatu bentuk kerja, sehingga diperlukan seorang manajer untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka pelaksanaan kegiatan

tersebut adalah fungsi dari manajemen yang terdiri dari beberapa unsur. Pertama, *Planning* atau perencanaan, yaitu untuk menentukan tujuan apa yang akan dicapai dari suatu periode tertentu yang akan datang disertai dengan suatu cara agar dapat mencapai tujuan tersebut. Kedua, *Organizing* atau pengorganisasian, yaitu untuk mengelompokkan serta menentukan kegiatan sebagai pelaksanaan dengan pembagian serta penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ketiga, *Staffing/kepegawaian*, yaitu menentukan keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Keempat, *Motivating/pemotivasian*, yaitu memberikan pengaruh dengan cara mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan. Kelima, *Controlling* atau pengawasan, yaitu dengan mengukur pelaksanaan untuk mencapai tujuan, merangkum sebab penyimpangan dan mengambil tindakan preventif untuk langkah evaluasi dan perbaikan.

Dalam fungsi pembiayaan pendidikan setidaknya ada tiga:

- 1) Optimalisasi sumber dana, fungsi manajemen pembiayaan pendidikan adalah optimalisasi sumber pembiayaan yang diperoleh, sehingga mengantarkan pada lulusan pendidikan yang berkualitas.
- 2) Alokasi, alokasi pembiayaan pendidikan merupakan proses financial decision. Dan kebijakan dalam menentukan alokasi pembiayaan pendidikan ini harus mengedepankan program prioritas dalam sebuah proses pendidikan.
- 3) Distribusi, distribusi merupakan proses penyaluran dana sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan.

2.1.2.4 Ruang Lingkup Pembiayaan Pendidikan

Manajemen setidaknya mempunyai tiga ruang lingkup, yaitu perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan (*akunting*), dan tahap penilaian atau evaluasi (*auditing*).

- 1) Perencanaan Keuangan (*Budgeting*)

Penganggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan penyusunan

anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam waktu tertentu. Dalam menentukan biaya satuan pendidikan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid.

Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Menurut Mulyana dengan mengutip pendapat Morphet dalam Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pengangggaran biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran belanja harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
- b. Mengembangkan sistem perencanaan yang efektif.
- c. Memonitor dan menilai lulusan pendidikan secara terus menerus dan berkesenambungan sebagai bahan perencanaan berikutnya.

2) Pelaksanaan (*accunting*)

Akunting digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Pelaksanaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Keduanya ini harus dibukukan sesuai prosedur pengelolaan selaras dengan dengan ketentuan atau kesepakatan bersama.

3) Tahap penilaian atau evaluasi (*auditing*).

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian barang bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Secara sederhana pengawasan terdiri dari memantau (*monitoring*), menilai dan melaporkan. Proses evaluasi ini harus dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manajemen keuangan

berjalan efektif dan efisien serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya.

2.1.3 Pendanaan Pendidikan

2.1.3.1 Pengertian Pendanaan Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015: 254) pendanaan pendidikan terdiri atas dua unsur kata yaitu pendanaan dan pendidikan. Pendanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pendanaan berasal dari kata “dana” yang memiliki arti uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya untuk mencapai kesejahteraan. Kata dana memiliki konotasi yang serupa dengan biaya, namun dana lebih bersifat umum sedangkan biaya lebih bersifat khusus. Untuk memudahkan dalam memahami definisi mengenai kedua terminologi tersebut, maka penulis jelaskan secara lebih rinci mengenai apa itu pendanaan dan pembiayaan.

Indra Bastian (2015: 160) menyebut dana pendidikan sebagai sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan biaya pendidikan adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk mendanai berbagai kegiatan pendidikan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Sedangkan pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan. Sedangkan kata pendidikan jika ditelisik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015: 200), berasal dari kata didik yang memiliki arti memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan. Sedangkan definisi pendidikan sendiri, menurut Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain (2014: 3) adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Adapun pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Kemudian, menurut Arifin (2007: 12), ada beberapa ahli di Barat menjelaskan tentang konsep pendidikan antara lain:

- 1) Mortimer J. Adle mengatakan, pendidikan adalah proses di mana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat mengetahui pembiasaan, disempurnakan dengan pembiasaan- pembiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik.
- 2) Herman H. Horne berpendapat, pendidikan harus dipandang sebagai suatu proses penyesuaian diri manusia secara timbal balik dan berinteraksi dengan alam sekitar, dengan sesama manusia.
- 3) William Mc Gucken SJ berpendapat, pendidikan diartikan oleh ahli scholastic, sebagai suatu perkembangan dan ketangkapan dari kemampuan manusia baik moral, intelektual, maupun jasmaniah yang diorganisasikan, dengan atau untuk kepentingan individu atau sosial untuk mencapai tujuan akhir.

Berdasarkan definisi di atas, menurut Akhmad ada 3 (tiga) pemikiran utama yang terkandung didalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain: 2014, 4).

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab

bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua. Tanggung jawab pemerintah memberikan dana penyelenggaraan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab sosial yang diemban oleh negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. Perwujudan tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dinyatakan dalam pengalokasian dana pendidikan oleh pemerintah (APBN) sebesar 20%. (Tamam 2018)

Komitmen negara tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 dan Pasal 49 ayat (1), Perubahan UUD 1945 ke IV Pasal 31 ayat (4), dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan perkara No. 24/PUU-V/2007. Sedangkan tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat secara kelembagaan mendirikan satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua atau wali peserta didik yang membiayai penyelenggaraan di tingkat satuan pendidikan.

Terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pendidikan, pemerintah telah menganggarkan pemenuhan dana atau biaya pendidikan sebesar 20% sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang merupakan cerminan keinginan segenap bangsa Indonesia untuk memiliki pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Pencapaian pendidikan nasional yang lebih merata dan bermutu lebih jauh dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pasal 3 dan 4. Pasal 3: “Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”. Pasal 4: “Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”.

2.1.3.2 Kebijakan Pendanaan Pendidikan

Pada abad XXII ini dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah

menyebabkan berkurangnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran pendidikan dan menurunnya kemampuan sebagian orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya. Hal tersebut telah berakibat meningkatnya angka putus sekolah (drop-out) dan terganggunya proses pemerataan.

Kedua, globalisasi yang ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi telekomunikasi (tele communication), transportasi (transportation) dan perdagangan (trade) telah menjadikan dunia seakan tanpa batas (world borderless society). Menghadapi globalisasi, dunia pendidikan dituntut supaya mempersiapkan SDM yang berkualitas agar mampu bersaing dalam pasar kerja global dan sekaligus siap menghadapi dampak negatifnya.

Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman (pluralisme) daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi keluarga (orang tua) dan masyarakat. Di samping itu, salah satu persoalan dasar pendidikan di Indonesia selama kurang waktu 34 tahun sejak dicanangkan pembangunan pendidikan secara intensif tahun 1971 adalah masih rendahnya mutu pendidikan. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh rendahnya biaya pendidikan. Sehingga perbaikan biaya pendidikan merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Persoalan rendahnya biaya pendidikan (financing of education) sebenarnya sudah berlangsung lama bahkan terkesan sengaja diciptakan oleh penguasa sebagai bagian desain besar dalam rangka politisasi kehidupan masyarakat termasuk pendidikan (Tilaar: 2012, 76). Bahkan politisasi tersebut berlangsung semakin menguat setelah era reformasi. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pendidikan termasuk bidang yang diotonomikan dan menjadi tanggung jawab daerah. Kondisi tersebut menjadikan upaya pengelolaan dan peningkatan pembiayaan menjadi semakin kompleks.

Sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seharusnya berusaha untuk mengalokasikan dana 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan (pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas). Namun pendanaan pendidikan yang harus ditanggung APBD, telah tanpa sadar menarik pendidikan dalam kancah politik di daerah. Karena besar kecilnya porsi biaya pendidikan tersebut akan mempengaruhi struktur APBD, yang tentu saja perhatian terhadap pendidikan akan sangat terpengaruh oleh kepentingan politik.

Biaya pendidikan (karena adalah masalah uang) pada gilirannya tidak lagi murni untuk pendidikan, akan tetapi didalamnya sudah tercampur dengan berbagai kepentingan. Akibatnya porsi pendidikan tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar kebutuhannya, namun seberapa strategis bidang pendidikan dalam menjaga dukungan politis. Semakin strategis dalam porsi tersebut maka akan semakin besar porsi pendidikan dalam APBD. Sebaliknya apabila (ada/banyak) bidang lain yang dianggap lebih strategis, tentu saja porsi pendidikan dalam APBD akan ‘terjepit’.

Pendanaan pendidikan nasional diatur dalam satu bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu bab XIII, pasal 46, 47, 48, 49. Bab ini mengatur tentang tanggung jawab pendanaan (pasal 46), sumber pendanaan (pasal 47), pengelolaan dana pendidikan (pasal 48), dan pengalokasian dana pendidikan (pasal 49). Dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah (pusat), Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Dalam hal ini masyarakat diartikan sebagai kelompok warga negara Indonesia, non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian masyarakat harus dibedakan dengan orang tua peserta didik atau dengan peserta didik (pasal 1 butir 7, 28, 29, 44, dan 46).

2.1.3.3 Manajemen Pendanaan Pendidikan

Dalam Ketentuan Umum, dan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dana pendidikan yang dimiliki

lembaga pendidikan haruslah dapat dikelola sesuai dengan kebutuhannya. Seringkali dana yang dimiliki lembaga pendidikan terbatas atau kurang, sehingga lembaga pendidikan harus membuat daftar anggaran pengeluaran sesuai dengan prioritas kebutuhan lembaga pendidikan. Terkait dengan pendanaan pendidikan payung hukumnya adalah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 47 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.

Maksud prinsip keadilan di sini adalah sumber pendanaan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat daerah yang bersangkutan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan sumber lain biaya penyelenggaraan pendidikan. Begitu juga prinsip kecukupan adalah bahwa dana penyelenggaraan pendidikan mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005). Sedangkan prinsip keberlanjutan di sini adalah bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan juga mewajibkan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota juga menganggarkan dana pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendanaan yang berasal dari pemerintah jika dilihat dari jumlah APBN dan APBD masing-masing pemerintah daerah tentunya potensi yang sangat besar, perlu dikelola dengan baik dan professional sehingga memiliki nilai manfaat yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Nanang Fattah (2006) dalam Nurteti (2008), pengelolaan dana pendidikan di lembaga pendidikan mencakup 2 (dua) aspek, yakni: 1) dimensi penerimaan atau sumber dana; dan 2) dimensi pengeluaran atau alokasi dana. Dimensi pengeluaran antara lain bersumber dari: penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan- sumbangan masyarakat, sedangkan dimensi pengeluaran mencakup pengeluaran modal atau anggaran pembangunan

(capital outlay/ expenditure).

Selanjutnya dalam Nurteti (2008), menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan berbagai manfaat di antaranya: 1) memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal tercapai sebuah tujuan tertentu; 2) memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta dan lembaga penyedia jasa kursus); dan 3) dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau adanya - penyimpangan penggunaan dana dari rencana awal.

2.1.3.4 Bentuk Pendanaan Pendidikan

Dalam pendanaan pendidikan, orang tua wajib membiayai pendanaan pendidikan anak-anaknya mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi (PT). Adapun pendanaan orangtua terhadap anak-anaknya dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk pendanaan sebagai berikut:

1) Biaya Operasional Sekolah

Biaya Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar Sembilan tahun. Pendanaan BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lainnya. Sasaran program BOS adalah semua siswa/siswi jenjang sekolah dasar (SD/MI), (SMP/MTs), dan (SMA/MA/MAK).

2) Fasilitas Belajar di Sekolah

Untuk mendukung berbagai kegiatan belajar mengajar di sekolah seyogyanya dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti adanya ketersediaan media pembelajaran seperti buku pegangan guru, pegangan siswa, papan tulis, spidol, projector, LCD, Komputer, Laptop, dan lain sebagainya.

3) Kesempatan Belajar

Setiap anak di negeri ini tentunya memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, baik kalangan yang mampu maupun tidak mampu. Kesempatan belajar ini dapat diberikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga ke perguruan tinggi. Bahkan pemerintah melalui lembaga pendidikan wajib memberikan beasiswa baik beasiswa tidak mampu maupun beasiswa prestasi kepada setiap anak bangsa di negeri ini. Sehingga dengan adanya apresiasi ini mampu menciptakan anak-anak bangsa yang tidak hanya cerdas dan dapat bermanfaat keak bagi pembangunan bangsa.

4) Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler ini tentunya kegiatan yang dilakukan diluar jam sekolah untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Misalnya dengan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, PMR, Karate, Paskibraka, Bola, Musik, Sains, dan lain sebagainya.

Tentunya dengan berbagai bentuk pendanaan pendidikan yang ada di atas tidak luput dari peran serta orangtua dalam pendanaan pendidikan bagi anak-anaknya. Jika hanya mengharapkan pendanaan pendidikan dari pemerintah tentunya lembaga pendidikan tidak dapat mandiri dan maju dalam menyongsong masa depan. Untuk itu peran serta orang tua dalam pendanaan pendidikan sangatlah penting guna sebagai pendukung terselenggaranya pendidikan nasional.

2.1.3.5 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendanaan Pendidikan

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015: 302) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Sedangkan orang tua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015: 330) merupakan orang yang lebih tua atau dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak. Kata orang tua merupakan kalimat majemuk, yang secara leksikal berarti “Ayah Ibu kandung: orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya), orang-orang yang dihormati

(disegani). Tidak ada orang tua yang tidak berkorban demi anaknya. Prinsip ini terbukti dengan komitmen orang tua dalam memelihara anak-anaknya hingga tumbuh besar. Apapun yang dimiliki oleh orang tua akan diberikan asalkan anaknya mendapatkan suatu keadaan yang diimpi-impikan oleh segenap insan manusia yaitu—kebahagiaan. Besar harapan orang tua untuk menjadikan keadaan anaknya menjadi lebih baik daripada mereka. Cara yang ditempuh orang tua pun bermacam-macam untuk mewujudkan harapan mereka. Tapi ada satu jalan yang tidak mungkin tidak dilakukan orang tua demi mendapatkan sebuah kebahagiaan, yaitu menyekolahkan anak mereka.

Mengenai tanggung jawab orangtua terhadap pendanaan pendidikan anaknya juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) yang diuraikan dengan jelas bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat; sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah meliputi: (a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, (b) peserta didik, orangtua, atau wali peserta didik, (c) pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan. Pengertian pasal 2 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari pada Bab XIII pasal 46 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang intinya adalah bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pendanaan menyangkut keperluan sekolah, seperti biaya kegiatan kesiswaan, kegiatan kurikulum, tagihan listrik, ledeng, langganan koran, majalah dan internet, petugas sampah dan cleaning service. Tidak kalah adanya tuntutan menyangkut honor guru tidak tetap (honorar) dan instruktur ekstrakurikuler, insentif guru, pembelian peralatan kegiatan belajar, pemeliharaan gedung, dan penyelesaian sarana dan prasarana.

2.1.4 Pengendalian Pembiayaan Pendidikan

2.1.4.1 Definisi Pengendalian

Fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari

orang-orang yang ada di dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi berperilaku. Tetapi, tidak semua desain penelitian fokus pada perilaku manusia. Aplikasi mekanikal dari pengendalian seperti termometer yang mengendalikan temperatur tubuh, lebih menekankan pada sifat mekanikal dibandingkan dengan sifat perilaku. Sasaran perilaku utama dari pengendalian keuangan dapat dijelaskan menggunakan definisi pengendalian secara umum. Pada umumnya, pengendalian didefinisikan sebagai suatu inisiatif yang dipilih, yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Pada pengendalian keuangan hasil yang diinginkan merupakan peristiwa- peristiwa perilaku dan aplikasi dari masalah-masalah keuangan.

Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan. Para manajer membutuhkan suatu keyakinan tentang cara dunia mereka bekerja dan dampak- dampak yang mereka harapkan dari suatu inisiatif yang dipilih. Dalam konteks organisasi yang benar-benar nyata, adalah penting untuk memahami dengan baik hubungan sebab-akibat karena penjabaran secara nyata menjadi sulit sebagai akibat dari kompleksitas lingkungan. Misalnya saja, penyusunan standar yang tinggi pada sistem akuntansi tidak dapat menjamin bahwa para karyawan akan menjadi lebih produktif. Demikian pula penerapan atas sistem pertanggungjawaban tidak dapat menjamin bahwa para manajer akan lebih bertanggung jawab dan efektif dalam mengalokasikan sumber daya yang dikuasai. Dalam memilih pengendalian keuangan, manajer akan mendasarkan pilihan mereka pada kepercayaan dan pengalaman-pengalaman masa lalu mereka.

Pengendalian merupakan proses yang mengarahkan setiap orang dalam suatu organisasi agar melakukan kegiatan yang tertuju untuk menjamin agar program pengembangan dan program pendidikan dilakukan sesuai dengan rencana sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif.(Niron 2019)

Tanggung Jawab Keuangan Pendidikan adalah kewajiban Lembaga Pendidikan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan unit atau satuan Pendidikan secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, efektif, dan

transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan adalah Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.(Darwin 2021a)

Pengendalian terhadap penggunaan dana pendidikan pada lembaga pengelola pendidikan dilakukan berdasarkan dokumen rencana kerja anggaran (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga=RKA- KL) pada lembaga pengelola dan penyelenggaran pendidikan dan RAPBS/M pada satuan pendidikan, yang sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan, yang menyangkut:

- 1) jenis anggaran (belanja rutin atau belanja investasi)
- 2) kategori peruntukan (belanja barang, gaji dan honorarium, belanja habis pakai, dan belanja lain-lain)
- 3) plafon maksimal yang boleh dilakukan (pagu yang ditetapkan untuk setiap kegiatan/program), serta
- 4) cara pembelanjannya (swa-kelola atau kontrak).

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses penggunaan dan pencatatan transaksi keuangan pada suatu satuan unit pendidikan yang menunjukkan kondisi keuangan dalam 1 (satu) periode akuntansi yang memperlihatkan gambaran umum tentang kinerja keuangan.(Darwin 2021a). Tujuan pengendalian keuangan dalam hal pendanaan pendidikan, pengendalian ditujukan untuk memobilisasi dan mengarahkan agar setiap orang dalam organisasi mengelola dana pendidikan sesuai dengan rencana (penggalian sumber-sumbernya maupun rencana penggunaannya). Pengendalian merupakan bagian dari manajemen pendidikan, oleh karena itu pengendalian terhadap pelaksanaan pendanaan pendidikan baik di lembaga pengelola, lembaga penyelenggara, maupun satuan pendidikan menjadi kewajiban masing-masing pimpinan organisasi tersebut.

Apabila setiap akhir bulan, Menteri melakukan rapat koordinasi untuk meminta laporan pelaksanaan anggaran dari unit di bawahnya, itu merupakan salah

satu kegiatan pengendalian yang dilakukan di tingkat Departemen Pendidikan Nasional. Pengendalian di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten dilakukan oleh Kepala Dinas masing-masing. Dalam kerangka manajemen pendidikan berbasis sekolah (school based management) pengendalian internal sekolah/madrasah dapat dilakukan secara internal oleh kepala sekolah/madrasah sendiri dan secara eksternal oleh komite sekolah, yayasan/pesantren, pengawas, dan kantor dinas pendidikan atau Departemen Agama kabupaten/kota yang mengelola bidang pendidikan.(Niron 2019)

Sistem pengendalian keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, secara nasional. Sistem pengendalian keuangan yang berasal dari dana pemerintah dianut sistem pengendalian intern yang menyeluruh dengan ketetapan Presiden, seperti yang diatur dalam pasal 58 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam sistem ini, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yang berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan. Berdasarkan prinsip pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran ini, ada pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (ordonnateur) dan pemegang fungsi pembayaran (compatable). (Niron 2019)

2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah penyajian informasi mengenai (1) posisi keuangan, (2) realisasi anggaran, (3) arus kas, dan (4) kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,

dan ekuitas dana;

- 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan pendidikan mempunyai tujuan untuk membantu satuan pendidikan dalam hal:

- 1) Proses pengambilan keputusan. Informasi tentang kondisi keuangan sebagai bahan evaluasi serta juga perbandingan dampak keuangan terhadap pengambilan keputusan peningkatan mutu proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Menilai dan memprediksi perkembangan indicator kinerja keuangan satuan Pendidikan masa depan.

Jenis Laporan keuangan pendidikan terdiri dari :

- 1) Laporan Neraca (balance sheet)

Laporan neraca ini merupakan suatu laporan yang menjelaskan informasi kondisi keuangan suatu organisasi pada tanggal tertentu. Dari laporan tersebut dapat diketahui berapa jumlah aktiva (harta, aset), kewajiban (utang), serta juga ekuitas Satuan Pendidikan .

- 2) Laporan Arus Kas (cash flows)

Laporan arus kas ini merupakan financial statement suatu organisasi yang dipakai untuk dapat menunjukkan aliran masuk serta keluar kas pada

periode akuntansi. Laporan tersebut juga menjadi alat pertanggungjawaban cash flows selama periode pelaporan.

2.1.4.3 Konsep Pengendalian Internal Pendidikan

Menurut Mulyadi (2013:6) pengendalian internal adalah bagian dari sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016). Konsep pengendalian intern di dunia pendidikan merupakan konsep yang berbeda ketika diterapkan pada perusahaan – perusahaan atau lingkungan diluar pendidikan.

Auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataannya tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.(Darwin 2021)

Dari segi jenis akuntabilitas yang akan dicapai (Sumber : UU No.15 tahun 2004 pasal 4 ayat 1 dan pasal 16), ada tiga jenis audit yaitu:

- 1) Audit kinerja, untuk mengukur tingkat kinerja dalam mencapai sasaran program yang direncanakan guna memperoleh gambaran tingkat akuntabilitas pelaksanaan program pendidikan. Ini dilakukan melalui pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi.
- 2) Audit manajemen, untuk melihat seberapa jauh akuntabilitas pengelolaan program pendidikan yang dilaksanakan dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan,
- 3) Audit keuangan, yang melihat seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan dalam mendukung pelaksanaan dan

manajemen program pendidikan yang telah direncanakan. Ini dilakukan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan dengan memberikan opini audit,

Perbedaan tersebut meliputi langkah dan tujuannya. Di organisasi diluar pendidikan pengendalian intern dilakukan untuk mewujudkan organisasi yang teliti baik dari segi sumber daya manusia maupun managemennya. Tujuan adanya pengendalian intern didalam organisasi diluar pendidikan adalah sebagai lembaga kontrol dibawah top managemen sehingga upaya meminimalisir terjadinya kendala yang disebabkan oleh internal organisasi bisa dengan mudah di atasi atau dikendalikan. Hal ini digambarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sischa Dwiyani (2018) bahwa pengendalian intern dibentuk di perusahaan jasa Freight Forwarding PT. Speedmark Logistik Indonesia Surabaya disebabkan karena adanya beberapa permasalahan salah satunya adalah Inefisiensi proses pembuatan tagihan menjadi tertunda atau mempengaruhi lamanya proses pembuatan Invoice.

Sedangkan konsep pengendalian intern di lingkungan pendidikan digunakan sebagai alternatif penyelesaian problematika dengan orang tua peserta didik terkait dengan tingginya tagihan biaya pendidikan yang mempengaruhi keberlangsungan operasional suatu lembaga pendidikan. Mengingat lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang bekerja secara optimal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.(Yunita 2021)

Menurut Romeey dan Steinart (2009:229) dikutip dari Pujiani (2015:107) bahwa pengendalian internal mempunyai tiga fungsi penting yang meliputi :

- 1) Pengendalian untuk pencegahan (preventive control), dicegah untuk mencegahnya timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Misalnya : Memperkerjakan personil akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas, pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi.
- 2) Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control), dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Misalnya pengendalian untuk pemeriksaaan adalah pemeriksaaan salinan atas

perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan. Pengendalian yang kedua ialah tim pengendalian intern sebagai bahan pemeriksaan sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi di bank atau lembaga lain selain pendidikan. Seperti telah dijabarkan di awal bahwasanya pemeriksaan sebatas memeriksa uang yang masuk dan tunggakan biaya peserta didik. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji seberapa besar kebutuhan operasional sekolah yang tertera dalam RAPBS dengan pemasukan yang diterima sekolah sesuai dengan dasar tersebut tim dapat menentukan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada orang tua yang memiliki pembiayaan bermasalah kepada sekolah.

- 3) Pengendalian korektif (corrective control), dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditemukan, dan mengubah sistem agar masalah dimasa mendatang dapat diminimalisir atau dihilangkan. Merujuk pada pengertian di atas dokumentasi yang sebelumnya telah dilakukan (data pembiayaan dan pembiayaan bermasalah atas biaya rutin peserta didik) tim melakukan identifikasi atas kondisi ekonomi orang tua yang memiliki pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar prosedur tindakan tepat sasaran.

Audit Internal Mempunyai tugas membantu manajemen puncak (top management) dalam mengawasi asset (saveguard of asset) dan mengawasi kegiatan operasional organisasi sehari-hari. Bekerja atas nama, dari dan untuk organisasi yang mereka audit, oleh karena itu tugas auditor intern adalah mengaudit seluruh unit organisasi termasuk tingkat manajemen organisasi serta termasuk tentang compliance audit. Unit yang melakukan audit internal tersebut adalah seperti Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Satuan Pengendalian Internal (SPI), atau Unit Penjaminan Mutu (UPM), atau sebutan lainnya.

Sanksi bagi pelanggaran hukum di bidang keuangan negara (Pasal 59 UU

No.1/2004) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- 2) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

2.1.4.4 Aspek Keperilakuan dari Pengendalian Keuangan yang Komprehensif

Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang spesifik.

1) Perencanaan

Perencanaan dalam organisasi adalah esensial, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibandingkan fungsi manajemen lainnya. Fungsi pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sebenarnya hanya melaksanakan keputusan perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Usaha perencanaan formal lebih dari sekadar mengisi lembaran dokumen perencanaan. Aspek terpenting proses penetapan tujuan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi. Jika struktur organisasi kurang memadai, maka hal ini akan menjadi permasalahan utama dari proses perencanaan.

Masalah pokok dari perencanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapat menjadi kunci pengendalian yang efektif. Pengendalian juga dapat menjadi pokok

perencanaan yang efektif. Perencanaan yang terlalu teknik atau terlalu logis dapat menimbulkan kerusakan pada pengendalian bagi mereka yang kurang waspada, karena tidak ada perhatian yang utuh pada implikasi pengendalian terhadap implementasi rencana. Pada kondisi ini, pengendalian membutuhkan sesuatu untuk dapat beroperasi sebagai suatu rangkaian pembatasan bagi fungsi perencanaan. Fenomena ini umumnya terjadi pada lingkungan organisasi berteknologi tinggi karena secara klinis hal tersebut diyakini akan memungkinkan terbentuknya proteksi bagi organisasi terhadap ancaman yang dapat menggagalkan peran pengendalian.

2) Operasi

Operasi sering kali didefinisikan sebagai proses transformasi. Ada dua jenis proses dalam kegiatan operasi, yaitu proses inti (core process) dan proses pendukung (support process). Proses inti merupakan serangkaian kegiatan yang menyampaikan nilai pada pelanggan. Sementara itu proses pendukung memberikan sumber daya dan input yang penting ke dalam proses inti yang penting bagi pengelolaan kegiatan perusahaan atau organisasi. Pengendalian operasi merupakan suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas operasi selama proses implementasi terhadap rencana manajemen. Contoh pengendalian operasi seperti pengorganisasian subsistem meliputi aplikasi pembelian dan persediaan, perhitungan biaya standar dan subsistem rumah tangga, seperti administrasi penggajian dan manajemen kredit. Pada berbagai organisasi, pengendalian operasi merupakan tanggung jawab manajer pemilik, yaitu mereka yang ahli dalam mengendalikan pengoperasian lewat sesuatu yang tidak formal dan berfokus pada manusia. Organisasi yang lebih kompleks dan lebih besar dituntut untuk lebih memformalkan pengendalian operasi guna menjamin standar yang efektif dan meningkatkan efisiensi operasi.

3) Umpan Balik

Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dihasilkan secara

rutin dan statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Evaluasi ini akan memengaruhi distribusi kompensasi, pemberian sanksi dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi sebagai akibat dari umpan balik.

Dalam aplikasi manajemen, keberadaan faktor manusia dan kompleksitas dari motivasi manusia mendukung pernyataan bahwa hubungan antara umpan balik dan motivasi manusia mendukung pernyataan bahwa hubungan antara umpan balik dan tindakan berikutnya masih diwarnai dengan ketidakpastian dan kerumitan. Perencanaan, operasi dan aktivitas umpan balik telah diidentifikasi sebagai tiga aspek proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu. Ketika setiap dimensi ini dibahas, dimensi tersebut bukan merupakan aktivitas yang terkait. Saling keterkaitan antar subsistem pengendalian juga memegang peranan yang penting atas hasil yang kurang memuaskan. Logikanya, perencanaan lebih dahulu ada dibandingkan dengan operasi dan ukuran umpan balik yang berasal dari rencana operasi serta tujuan yang ditetapkan. Demikian pula, jika ukuran umpan balik diasumsikan bersifat netra dan relatif longgar, maka bisa diharapkan bahwa umpan balik dipandang sebagai tindakan pengumpulan ukuran umpan balik itu sendiri dan tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap tahapan perencanaan dan operasi. Sebagai konsekuensinya, ukuran umpan balik lebih menekankan pada operasi bukannya pada hal-hal yang bersifat evaluasi terhadap operasi itu sendiri.

2.1.5 Mutu Pendidikan

2.1.5.1 Konsep Mutu Pendidikan

Isu tentang mutu pendidikan terus berkembang sejalan dan sejurus dengan perkembangan kebutuhan dan kesiapan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu sebabnya adalah rendahnya peluang kerja bagi alumni tingkat SLTA dan beratnya persaingan bagi alumni Perguruan Tinggi, sebagai tenaga potensial yang terampil dalam merebut dan memanfaatkan kesempatan kerja. Identifikasi terhadap kondisi tersebut dialamatkan pada rendahnya mutu lulusan, dalam arti pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang belum sesuai kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan dua kerja.

Perspektif perencanaan mutu pendidikan disiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan setiap tahapan dalam pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan konsisten. Kajian mutu dari segi proses mengandung arti efektivitas atau ketepatan dan efisiensi keseluruhan faktor-faktor atau unsur-unsur yang berperan dalam proses pendidikan. Sekolah yang berada di daerah pedalaman terkesan kumuh sedangkan sekolah diperkotaan dicitrakan lebih elit dan bonafit, sementara menerima calon siswa yang sama, tetapi karena kualifikasi guru, kelengkapan sarana dan prasarana, suasana belajar yang berbeda, pengelolaan yang tingkat efisiensinya juga tidak sama. Maka sangat wajar bila proses pendidikan pada sekolah di daerah elit akan jauh lebih baik karena faktor ketepatan, kelengkapan, dan efisiensi pengelolaan yang lebih sempurna.

Menurut Hari Sudradjad pendidikan yang bermutu adalah Pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) mereka yang mampu mengintegalkan iman, ilmu, dan amal.

Mutu diartikan “sebagai tingkat baik buruknya sesuatu; kadar, derajat atau taraf; mutu” (Alwi, 2008: 768). Dengan kata lain keunggulan yang di miliki oleh seseorang atau kelompok. Mutu adalah “kemampuan dari suatu produk atau jasa dalam memuaskan pelanggan” (Fattah, 2012: 2). Kualitas atau mutu mula-mula digunakan oleh Plato dan Aristoteles untuk menyatakan esensi suatu benda atau hal dan merupakan atribut yang membedakannya dengan benda/hal lainnya (Hamalik, 1992: 33). Adapun dalam kamus *Webster New World Dictionary*, pengertian kualitas yaitu *The degree of excellent of a thing* (Burnalik, ed., t.th.: 488). Sedangkan Nata (2011: 15) menjelaskan pendidikan merupakan “sebuah pranata

yang sangat dinamis dengan tugas utamanya menyiapkan umat manusia agar siap dan mampu menghadapi masa depannya”.

Frederick Y. Mc. Donald dalam bukunya *Educational Psychology* mengatakan: “*Education is a process or an activity which is directed at producing desirable changes into the behavior of human beings*”. (Donald, t.th.: 4). Kneller (1996: 14-15.) menyatakan bahwa *education is the process of self realization, in which the self realizes and develops all its potentialities*. Pendidikan adalah proses perwujudan diri di mana seseorang menyadari dan mengembangkan semua kemampuannya.

Pendidikan dikaitkan dengan tuntutan mutu pendidikan menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 (2013: 1) menyatakan: Mutu pendidikan mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan penilaian. Pengertian mutu dapat dilihat dari dua segi yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Segi normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan kriteria intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik kualitas pendidikan merupakan produk pendidikan yaitu manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Sedangkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik yaitu tenaga kerja yang terlatih. Segi deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan kenyataannya semisal hasil prestasi belajar (Anwar, 2004: 50).

Menurut Nurkholis (2003: 67), menyebutkan bahwa “kualitas memiliki dua konsep yang berbeda antara konsep absolut dan relatif”. Menurut Anwar (2004: 51) konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Bila dipraktikkan dalam dunia pendidikan yang absolut ini bersifat etitis, karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang mampu menawarkan kualitas tinggi pada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu membayarnya, sedangkan konsep relatif, kualitas bukanlah tujuan akhir, melainkan alat ukur atas produk akhir dari standar yang telah ditentukan. Mutu merupakan proses terstruktur yang membantu seseorang menetapkan apakah sasaran yang diharapkan tercapai

dengan memperbaiki setiap proses pendidikan.

Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran adalah tujuan organisasi pendidikan. Mutu pendidikan adalah mutu lulusan dan pelayanan yang memuaskan pihak terkait pendidikan. Mutu lulusan berkaitan dengan lulusan dengan nilai yang baik (kognitif, afektif, dan psikomotorik) diterima melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang berkualitas dan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan mutu pelayanan berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan peserta didik, guru dan pegawai serta masyarakat secara tepat dan tepat sehingga semua merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pihak sekolah.

Keunggulan dalam proses pendidikan dengan sendirinya akan menghasilkan produk yang lebih baik dan berkualitas. Tingkat kemampuan lulusan dalam arti penguasaan ilmu, keterampilan dan pengalaman para lulusan sekolah elit terjadi karena proses pendidikannya lebih baik, mutunya akan berbeda dari sekolah di daerah kumuh. Dengan demikian mutu proses akan menghasilkan mutu lulusan yang berbeda. Mutu dapat juga dikaji dari sudut internal efisiensi dan kesesuaian, secara internal efisiensi pendidikan akan terjadi apabila tujuan pendidikan secara kelembagaan dapat terlaksana dengan baik termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Mutu pendidikan itu, dapat dilihat dari sisi perencanaan, proses dan lulusan yang dihasilkan.

Pendidikan yang bermutu dari sisi perencanaan dapat diukur dengan ketepatan dokumen perencanaan yang disandingkan dengan proses pelaksanaannya. Sedangkan proses pelaksanaan dapat diukur dengan ketepatan, kelengkapan dan efisiensi pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif. Sedangkan mutu pendidikan dilihat dari sisi produk yakni apabila lulusan/output antara lain; 1) dapat menyelesaikan studi dengan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan pendidikan di sekolah, 2) memperoleh kepuasan atas hasil pendidikannya karena ada kesesuaian antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan hidupnya, 3) mampu memanfaatkan secara fungsional ilmu pengetahuan

dan teknologi hasil belajarnya demi perbaikan kehidupannya; dan 4) dapat dengan mudah memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan tuntutan dan harapan dunia kerja.

Mutu pendidikan dalam arti luas ditentukan oleh tingkat keberhasilan seluruh faktor yang terlibat untuk mencapai tujuan pendidikan. Di samping itu mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga harus disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan ini penilaian masyarakat tentang mutu lulusan sekolah pun terus-menerus berkembang. Mutu pendidikan itu bersifat multi dimensi yang meliputi aspek input, proses dan keluaran (output dan outcomes). Oleh karena itu, indikator dan standar mutu pendidikan dikembangkan secara holistic mulai dari input, proses dan keluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan mutu lembaga pendidikan adalah kebermutuan dari berbagai pelayanan/services yang diberikan oleh institusi pendidikan kepada peserta didik maupun kepada tenaga staf pengajar untuk terjadinya proses pembelajaran.

2.1.5.2 Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu merupakan sesuatu yang dianggap salah satu bagian penting, karena mutu pada dasarnya menunjukkan keunggulan suatu produk jika dibandingkan dengan produk lainnya. Peningkatan mutu merupakan usaha dari setiap lembaga-lembaga penghasil produk barang tetapi juga produk jasa.

Demikian halnya dalam pendidikan mutu merupakan bagian penting untuk diperhatikan. Sallis (2005: 1) mengungkapkan *“quality is at the top of most agendas and improving quality is probably the most important task facing any institution. However, despite its importance, many people find quality an enigmatic concept. It is perplexing to define and often difficult to measure”*. Kualitas adalah bagian penting dari seluruh agenda dalam organisasi dan meningkatkan kualitas mungkin adalah tugas yang paling penting yang dihadapi institusi manapun. Namun, meskipun penting, banyak terjadi perbedaan pendapat tentang konsep dan kualitas yang baik.

Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus menerus akan menjadi perbincangan dalam pengelolaan/ manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai. Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh stakeholder pendidikan. Semua orang tentunya akan lebih suka menuntut ilmu pada lembaga yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar ini maka sekolah/ lembaga pendidikan harus dapat memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar tidak ditinggalkan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. (Marwan 2022)

Untuk mengukur pendidikan yang berkualitas tentunya diperlukan kriteria/ indikator. Sallis (2005: 1-2) mengungkapkan ada banyak indikator mutu yang baik di lembaga pendidikan. Antara lain: 1) high moral values; 2) excellent examination results; 3) the support of parents, business and the local community; 4) plentiful resources; 5) the application of the latest technology; 6) strong and purposeful leadership; 7) the care and concern for pupils and students; 8) a well-balanced and challenging curriculum. Pandangan ini menjelaskan bahwa sekolah yang bermutu dan baik harus memiliki: 1) nilai-nilai moral/ karakter yang tinggi; 2) hasil ujian yang sangat baik; 3) dukungan orang tua, dunia usaha dan masyarakat setempat; 4) sumber daya berlimpah; 5) implementasi teknologi terbaru; 6) kepemimpinan yang kuat dan memiliki tujuan (visi); 7) kepedulian dan perhatian bagi siswa; 8) kurikulum yang seimbang dan relevan.

Di samping kriteria diatas, Sitompul (2006: 57) menambahkan kualitas pendidikan yang berhasil ditandai dari:

- 1) Tingginya rasa kepuasan pengajaran, termasuk tingginya pengharapan murid,
- 2) Tercapainya target kurikulum pengajaran,
- 3) Pembinaan yang sangat baik terhadap spiritual, moral, social dan pengembangan budaya pengajar,
- 4) Tidak ada murid yang bermasalah dalam kejiwaan atau resiko emosional

- 5) Tidak ada pertentangan antara hubungan murid dengan para guru/ staf.

Hadis dan Nurhayati (2010:3) menjelaskan dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumberdaya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan profesional.

2.1.5.3 Faktor Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Sudarwan Danim mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu:

- 1) Kepemimpinan Kepala Sekolah

Yang mana kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.

- 2) Guru

Perlibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah.

- 3) Siswa

Pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.

- 4) Kurikulum

Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals (tujuan) dapat dicapai secara maksimal.

5) Jaringan Kerja Sama

Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja.

2.1.5.4 Kebijakan Mutu Pendidikan

Secara yuridis, pemerintah sudah menetapkan konsep, standar pengendalian mutu pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama Pasal 57 yang mengatur tentang kewenangan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian mutu pendidikan. “Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Sedangkan pasal 58 menegaskan tentang Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Standar mutu pendidikan secara nasional diartikan sebagai sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Standar mutu pendidikan selanjutnya disebut Standar Nasional Pendidikan (SNP), dengan lingkup meliputi:

- 1) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- 2) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan

kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

- 3) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- 5) Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 6) Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- 7) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan
- 8) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Untuk menindak lanjuti perintah undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah

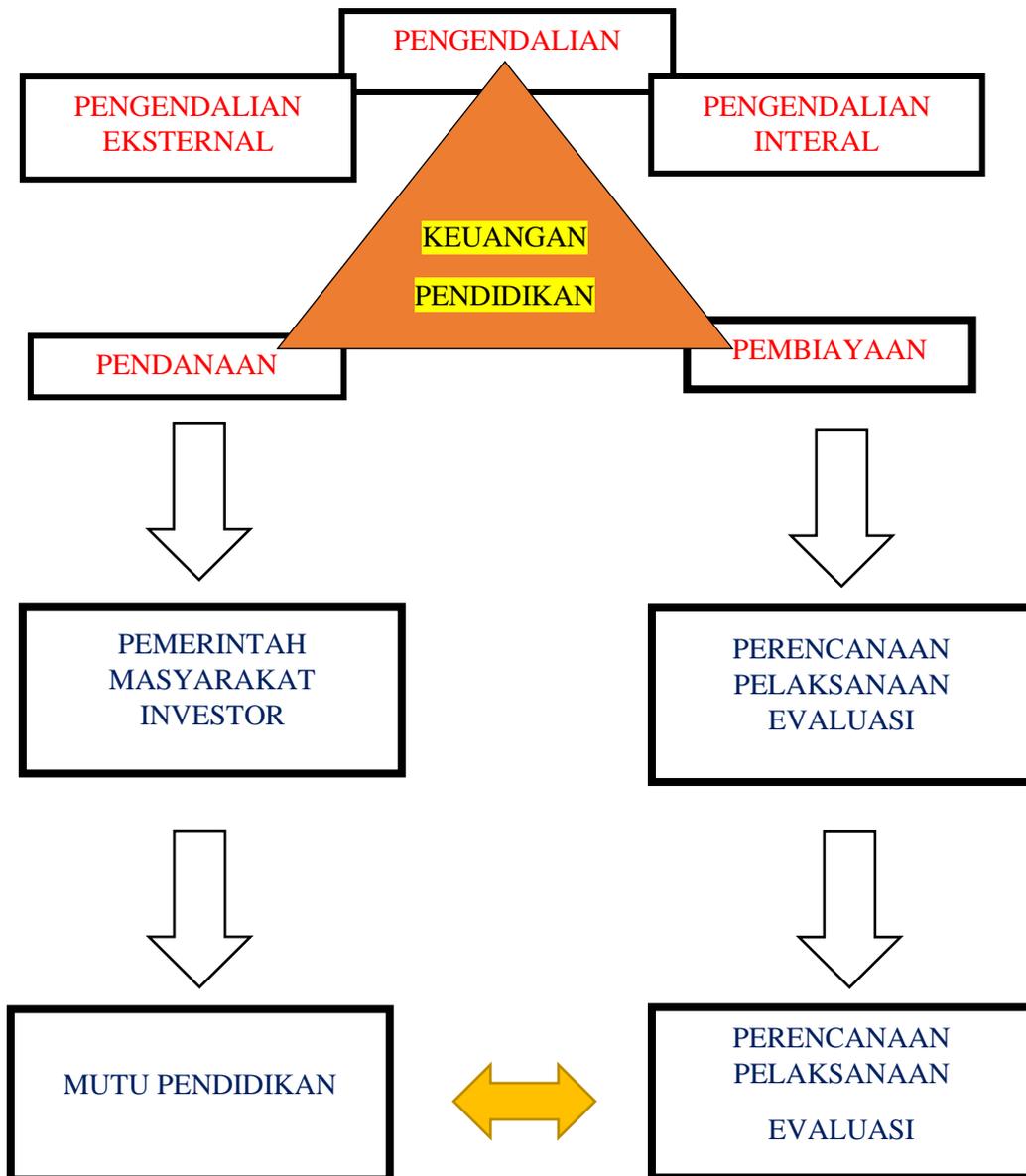
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2.2 KERANGKA KONSEPTUAL

Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, penggunaan (pelaksanaan) dan pertanggung jawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah. Secara umum kegiatan pokok yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi: (1).Perencanaan anggaran (*Budgeting*) yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis. (2) Pelaksanaan (*implementation involves accounting*) yaitu penggunaan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat. (3) Pertanggung-jawaban (*auditing*), yaitu proses penilai terhadap pelaksanaan program yang telah dibuat untuk pencapaian tujuan. Pertanggungjawaban adalah proses pembuktian bahwa apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, hal ini meliputi pertanggungjawaban, penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran dan sesuai perencanaan (proporsional).

Pengertian mutu menurut (Anwar, 2004: 52) adalah menyangkut dengan semua aspek yang berhubungan dengan segala kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendidik yang mempunyai tiga unsur pokok yaitu masukan, proses kegiatan dan hasil yang lebih sering dikenal dengan istilah *input*, proses dan *output*.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka konseptual manajemen pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pembiayaan Pendidikan

Sumber. Peneliti

2.3 KAJIAN PENELITIAN RELEVAN

Untuk lebih memperjelas mengenai permasalahan, peneliti akan menguraikan beberapa kepustakawan yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Panuntun (2015) Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul *Manajemen Pembiayaan pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAAL-Irsyad Gajah Demak*. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perencanaan anggaran madrasah untuk peningkatan mutu di MA Al-Irsyad Gajah Demak? 2) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di MA Al-Irsyad Gajah Demak? 3) Bagaimana sistem evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu di MA Al-Irsyad Gajah Demak? Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perencanaan anggaran madrasah untuk peningkatan mutu di MA Al-Irsyad Gajah Demak dilakukan dengan setiap guru mengajukan proposal sesuai kebutuhannya kemudian diserahkan kepada setiap waka, waka kemudian memberikan kepada kepala madrasah dan diteruskan kepada yayasan untuk disepakati dalam RAPBM tahunan. 2) Pelaksanaan pembiayaan madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di MA Al-Irsyad Gajah Demak dilakukan dengan membagi setiap sektor pendidikan sesuai kesepakatan rapat RAPBM secara efisien, efektif dan tepat guna demi peningkatan mutu pendidikan yang ada di MA Al-Irsyad Gajah Demak khususnya dalam meningkatkan mutu guru, siswa dan sarana dan prasarana pendidikan. 3) Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu di MA Al-Irsyad Gajah Demak dilakukan dengan dua cara, jika dana berasal dari pemerintah maka evaluasi langsung dilakukan pemerintah melalui laporan pertanggung jawaban pihak sekolah ke kementerian terkait, jika dana berasal dari bantuan masyarakat, orang tua, siswa maka evaluasi langsung dilakukan oleh kepala madrasah dan yayasan dengan menggunakan E-Bugeting.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Zidni Karimatan Nisa' (2018) Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pesantren Ar- Rohmah Putri Malang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) proses perencanaan anggaran di pesantren Ar-Rohmah disusun disajikan dalam RAB (Rancangan Anggaran Belanja)

disusun oleh akuntan kemudian dikoreksi oleh kepala bagian keuangan kemudian disetujui dan dirumuskan oleh budget oriented oleh direksi. Setelah disepakati dilakukan musyawarah yang melibatkan seluruh perwakilan dari setiap unit dalam sidang pleno RAKER (Rapat Kerja). Strategi pemenuhan anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pesantren Ar-Rohmah yakni: a) Strategi pemenuhan unit usaha (Loundry, Cantin, dan Catering), b) Sumbangan wajib santri, c) Bekerjasama dengan pihak luar yayasan, d) Bantuan dana Pemerintah, e) Berhutang apabila ada keterlambatan anggaran yang sudah direncanakan. 3) Pembiayaan hasil anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pesantren Ar-Rohman menggunakan model budget oriented yang diberikan kepada setiap unit yang ada dan memberikan kebebasan pihak unit untuk pengelolaannya. Untuk setiap pelaksanaan budget oriented sudah terealisasi sepenuhnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki atau fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur terinci dari kata-kata tertulis maupun lisan dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah yang harus ditempuh oleh peneliti secara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu yaitu untuk mencari pemecahan dari permasalahan yang telah dirumuskan. Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian, metode penelitian akan memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan.

Menurut Sugiyono (2010, hlm 1), “metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah yang diberlakukan untuk mendapatkan data objektif, valid, dan *reliable* dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.”

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Metode penelitian ini menuntut peneliti secara konsisten dan objektif dalam menyampaikan ide, gagasan, pendapat, sikap dan prilakunya sehingga didapat data yang objektif yang mampu memberikan makna tentang fenomena yang dilihat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu berusaha untuk mengungkap masalah yang terjadi pada masa sekarang. Lebih rinci, Moleong (1994:4-8) mengemukakan ciri- ciri penelitian kualitatif, yaitu: (1) Berlangsung dalam latar belakang alamiah, (2) Manusia atau peneliti berfungsi sebagai alat, (3) Metode kualitatif, (4) Analisis data secara induktif, (5) Teori dan dasar, (6) Deskriptif, (7) Lebih menekankan pada proses daripada hasil, (8) Terdapatnya batas yang ditentukan oleh fokus, (9) Adanya suatu kriteria khusus untuk keabsahan data, (10) Desain yang bersifat sementara, dan (11) Hasil penelitian dirundingkan untuk kemudian disepakati bersama. Ungkapan ciri-ciri penelitian kualitatif di atas menjadi pegangan peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga penggunaan metode ini tetap atau konsisten sampai berakhirnya proses penelitian yang ditandai dengan penyusunan laporan hasil penelitian.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini mengacu kepada populasi, sampel, dan sumber data. Sedangkan subjek adalah peneliti sendiri yang langsung turun ke objek penelitian. Objek penelitian merupakan tempat sasaran yang digunakan dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah pelaksana manajemen pembiayaan, pendanaan dan pengendalian sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kualuh Hilir, meliputi: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan Orang Tua Siswa SMA Negeri 1 Kualuh Hilir.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kualuh Hilir yang beralamat di Jalan Pasar Bilah Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Agustus

2022. Untuk lebih jelasnya waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1. dibawah ini:

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

NO	Keterangan	Waktu Penelitian									
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Pengajuan Judul										
2	Bab I, II, III										
3	Bimbingan										
4	Revisi										
5	Bimbingan										
6	Seminar Proposal										
7	Revisi										
8	Riset										
9	Bab IV, V										
10	Bimbingan										
11	Seminar Hasil										
12	Sidang										

3.4 Sumber Data

Sumber data primer adalah responden dan informan. Responden berbeda dari informan. Responden adalah sumber data tentang keragaman dalam gejala-gejala, berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif dan persepsi. Sedangkan informan ialah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga, dan data tentang hal-hal yang melembaga atau gejala umum. Sesuai dengan sifat luwes dalam desain penelitian kualitatif, maka tidak ada rincian jumlah dan tipe informan secara pasti. Hanya ada rencana umum mengenai siapa yang akan diwawancarai

dan bagaimana menemukannya di lapangan. Responden dipilih secara sengaja, setelah sebelumnya membuat tipologi (ideal) individu dalam masyarakat. Yang penting di sini bukanlah jumlah responden kasusnya, tetapi potensi tiap responden kasus untuk memberi pemahaman teoritis yang lebih baik mengenai aspek yang dipelajari.

Dalam kegiatan penelitian ini yang menjadi sumber informasi data adalah kepala sekolah, kepala tata usaha, bendahara sekolah, bendahara komite, wakil kepala sekolah, orang tua siswa, staf tata usaha dan seluruh guru dan pegawai SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir serta sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1) Data Primer

Menurut Melong, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, dengan melakukan pengamatan maupun observasi atau wawancara mendalam dengan informan yang telah ditetapkan yaitu Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Wakil Kepala sekolah, Kepala tata usaha dan bendahara komite sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari beberapa literatur dengan cara membaca dan menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian, disamping itu juga peneliti mengambil dari data yang dihasilkan yaitu seluruh guru, pegawai dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir. Teknik pengambilan data dengan mempunyai pertimbangan tertentu untuk pengambilan sampel untuk tujuan tertentu.

3.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik itu dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang manajemen pembiayaan, pendanaan, pengendalian dan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan antara peneliti dengan subjek penelitian dengan tujuan untuk menggali data/informasi yang diperlukan bagi pemecahan masalah penelitian. Biasanya dalam percakapan ini, peneliti menggunakan wawancara yang tidak berstruktur yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik subjek penelitian. Setelah diketahui, maka selanjutnya peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk memandu agar pembicaraan tidak menyimpang dari masalah yang sedang dibahas sehingga data/informasi yang diperlukan mudah untuk digali karena pembicaraan sudah sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian. Aspek-aspek yang akan ditanyakan dalam wawancara mencakup: (1) Aspek Manajemen Pembiayaan meliputi perencanaan anggaran (budgeting), perencanaan (implimentation involves accunting), Evaluasi pembiayaan; (2) Pendanaan dan Pengendalian Pembiayaan Pendidikan; (3) aspek terkait Mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kualuh Hilir meliputi input, proses, dan output.

2) Observasi

Observasi sebagai tehnik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan tehnik yang lain yaitu wawancara dan kuisioner. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas dengan orang, tetapi dengan objek-objek alam yang lain. Untuk mengumpulkan data dilakukan terjun dan melihat

langsung kelapangan, terhadap proyek yang diteliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang-barang tertulis, maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya, yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan dan mutu pendidikan.

Pelaksanaan pengumpulan data mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh S. Nasution (1988 : 33-34) yang menyatakan bahwa: “Tahap dalam pengumpulan data adalah tahap orientasi, eksplorasi, dan member-check”.

3.6 Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Analisis data dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang sudah diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Melis *and* humberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu:

- 1) *Data Reduction* (Reduksi Data) merupakan proses berfikir sintesif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari.
- 2) *Data Display* (Penyajian Data), penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang dilakukan oleh penulis adalah data-data yang diperoleh dari SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 3) *Conclusion drawing/verification* merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dalam penelitian kualitatif aspek proses lebih ditekankan dari pada hanya sekedar hasil. Dalam proses analisis kualitatif terdapat tiga bagian kegiatan utama yang saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis interaktif dari ketiga komponen utama tersebut.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal akan tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara atau masalah bayangan dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

3.7 Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data kualitatif dapat dilakukan dengan strategi tertentu, yaitu:

- 1) *Triangulation*
Yaitu teknik menggunakan multi investigasi, multi sumber atau data, atau multi metode untuk mengonfirmasi temuan yang muncul.
- 2) *Member check*
Yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.
- 3) *Long term observation*
Yaitu melakukan perpanjangan pengamatan dimana peneliti berada dilapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.
- 4) *Peer examination*
Yaitu teknik yang dilakukan dengan berdiskusi dengan teman sejawat tentang hasil sementara atau hasil akhir yang dilakukan peneliti.
- 5) *Participatory of collaborative modes of research*
Yaitu teknik ini menekankan pada partisipasi dalam keseluruhan fase penelitian mulai dari konseptual studinya, menulisnya hingga menghasilkan temuan.
- 6) *Researcher's biases*
Yaitu menekankan kemampuan peneliti mengklarifikasikan asumsi-asumsinya dan orientasinya terhadap sebuah teori.
- 7) *Analisis kasus negative*
Yaitu dengan melihat kasus negative, yaitu teknik dengan melihat kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga ada saat tertentu.
- 8) *Thick description*
Yaitu teknik ini digunakan untuk menguji keteralihan (validasi eksternal) dimana seorang peneliti dituntut melaporkan hasil penelitian dengan menguraikannya setelah mungkin.
- 9) *Auditing*
Yaitu melakukan audit kepada keseluruhan proses penelitian. teknik ini digunakan untuk menguji *dependability* (reliabilitas).

Dalam kaitannya dengan peneliti ini, peneliti menyimpulkan dengan menggunakan data teknik dalam pengumpulan data untuk menjamin keabsahan data yaitu:

1) *Triangulation*

Triangulation teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulation yang paling banyak digunakan adalah melalui sumber lainnya. Triangulation dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda melalui metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai melalui; (1) membandingkan hasil data pengamatan dengan wawancara (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau orang pemerintahan dan (5) membandingkan wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

2) *Member check*

Member check yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Teknik dilakukan peneliti dengan menunjukkan dan mengonfirmasi kembali data-data yang diperoleh sebelumnya kepada informan yang sama.

Nasution (1992:105) menjelaskan mengenai validitas penelitian antara lain dengan menyatakan: Keabsahan data merupakan konsep penting dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realiabilitas) menurut versi “positivisme”. Validitas membuktikan apa yang sesungguhnya ada dan terjadi dalam dunia kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan tentang dunia nyata memang

sesuai dengan yang sebenarnya ada atau terjadi.

Penelitian ilmiah membedakan dua macam validitas yaitu: (a) Validitas internal berhubungan dengan instrumentasi dalam penelitian kualitatif berarti adanya kesesuaian konsep peneliti dengan konsep dari responden; (b) Validitas eksternal mengenai generalisasi dan untuk kecocokan (fittingnes) kegiatan penelitian diaplikasikan peneliti lain dalam situasi dan konteks yang dihadapi, adakalanya mengadakan adaptasi sebelumnya. Nilai transfer tergantung pada si pemakai, menggunakan hasil penelitian dalam konteks dan situasi tertentu.

Lebih lanjut Nasution (1988:114-124) mengemukakan bahwa tingkat kebermaknaan suatu hasil penelitian kualitatif tergantung pada: a) kredibilitas (validitas internal), b) transferabilitas (validitas eksternal), c) dependabilitas (reliabilitas) dan konfirmabilitas (objektivitas).

1. Kredibilitas (Validitas Internal)

Kredibilitas (Validitas Internal) disebut juga validitas internal, yaitu sejauhmana hasil penelitian dapat sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam dunia kenyataan, atau penjelasan yang diberikan dalam proses penelitian memang demikian adanya. Untuk mencapai hal yang demikian maka dilakukan hal-hal berikut ini, seperti yang dikemukakan oleh S. Nasution (1988:114-117) yaitu: “(1) Memperpanjang masa observasi, (2) Pengamatan yang terus menerus, (3) Triangulasi, (4) Membicarakannya dengan orang lain, (5) Menganalisis kasus negatif, (6) Menggunakan bahan referensi, dan (7) Mengadakan member-check.” Hal-hal di atas dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengurangi kesenjangan antara apa yang diuraikan dengan peristiwa atau kejadian yang sesungguhnya terjadi.

2. Transferabilitas (validitas eksternal)

Transferabilitas (validitas eksternal) berkaitan dengan kegunaan penelitian di lapangan. Dengan kata lain, hingga manakah hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi-situasi yang lain di lapangan.

3. Dependabilitas dan Konfirmabilitas

Dependabilitas dan konfirmabilitas tidak bisa dipisahkan. Dependabilitas berkaitan dengan proses penelitian, apakah proses penelitian yang telah dilakukan dapat diulangi kembali dengan hasil yang sama atautkah tidak. Sedangkan

konfirmasi berhubungan dengan objektivitas hasil penelitian. Untuk memenuhi kriteria di atas, maka peneliti melakukan hal-hal berikut :

- 1) Menyediakan data mentah, seperti catatan lapangan dan dokumen hasil penelitian.
- 2) Menyimpan dan meneliti hasil penelitian berupa catatan lapangan dan dokumen.
- 3) Merumuskan pandangan atau tafsiran
- 4) Menyusun kesimpulan
- 5) Melaporkan seluruh proses penelitian

Beberapa hal yang diuraikan di atas, dilakukan untuk mencapai taraf dependabilitas dan konfirmasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibagi menjadi tiga bagian sub-sub bab yang meliputi: (1). Deskripsi hasil penelitian, (2). Temuan penelitian, (3). Pembahasan.

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah dan profil SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir

Sejarah singkat SMA Negeri 1 Kualuh Hilir adalah didirikan pada tahun 2002 oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dan diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2003 oleh Bupati Labuhan Batu H. T. Milwan sebelum berdirinya Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 21 Juli 2008 dengan nomor Surat Keputusan Pendirian Sekolah 420/379.DISDIK/2004. Pendirian SMA Negeri 1 Kualuh Hilir diawali oleh adanya keinginan dan semangat masyarakat, tokoh masyarakat, politisi Kecamatan Kualuh Hilir yang peduli dengan pendidikan untuk mengaspirasikan berdirinya sekolah SMA pertama di Kecamatan Kualuh Hilir kepada bupati Labuhanbatu. SMA Negeri 1 kecamatan kualuh hilir terletak di Jalan Besar Pasar Bilah Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah peserta didik di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir pada tahun ajaran 2019/2020 adalah berjumlah 401 orang yang terdiri atas 187 untuk jurusan IPA dan 214 untuk jurusan IPS dengan jumlah rombel 13 rombel, untuk tahun ajaran 2020/2021 berjumlah 452 orang yang terdiri atas 196 untuk jurusan IPA dan 256 untuk jurusan IPS dengan jumlah rombel 14 rombel, sedangkan untuk tahun ajaran 2021/2022 jumlah siswa berjumlah 485 orang yang terdiri atas 195 untuk jurusan IPA dan 290 untuk jurusan IPS dengan jumlah rombel 15 rombel. Keadaan siswa siswi pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir profil SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1**Profil SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir**

Nama Sekolah	SMA Negeri 1 Kualuh Hilir
NPSN	10205394
Jenjang Pendidikan	SMA
Alamat Sekolah	Jalan Pasar Bilah Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kode Pos	21474
Nomor Telepon	-
Status Sekolah	Negeri
Nilai Akreditasi Sekolah	B
Luas Lahan	-
Jumlah Rombel	15 Rombel
Berdiri Sejak	2002
Nomor SK	420/379.DISDIK/2004
Visi	Menjadikan Sekolah Unggul, Berwawasan Global, dan Berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa.
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Membina peserta didik unggul dalam perolehan nilai ujian sekolah serta berhasil masuk Perguruan Tinggi Negeri2. Mengembangkan inovasi pembelajaran sesuai tuntutan hidup3. Mewujudkan pengelolaan pendidikan yang profesional4. Menumbuh kembangkan budaya sehat dan peduli lingkungan5. Menumbuh kembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik sehingga dapat menghayati dan

	mengamalkan ajaran agama yang dianut dalam aspek kehidupan.
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Organisasi Estrakurikuler yang aktif untuk meningkatkan keterampilan siswa. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana sekolah berdasarkan IPTEK 3. Mengembangkan Media Pembelajaran berdasarkan Teknologi. 4. Mengembangkan manajemen yang akuntabel dengan tata kelola yang baik.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah memenuhi 8 Standart Nasional Pendidikan dengan nilai akreditasi A 2. Peserta didik menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya dan seni untuk menghadapi tantangan hidup. 3. Peserta didik dapat diterima diperguruan tinggi minimal 50 %. 4. Peserta Didik berprestasi dalam lomba OSN 5. Menjadikan siswa yang beriman, berakhlak mulia sesuai Pancasila.

Sumber. Data Tata Usaha SMAN 1 Kualuh Hilir

4.1.2 Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berjumlah 40 orang yang terdiri dari 7 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), 20 Guru Honorer TK. I Provinsi Sumatera Utara, 6 guru honorer sekolah, dan 2 tenaga perpustakaan, 5 tenaga administrasi sekolah, dan 1 orang penjaga keamanan sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Kualuh Hilir dapat dilihat pada lampiran 3.

4.1.3 Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.2

Keadaan Sarana Prasarana SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gudang	1	Baik
2	Ruang Kelas	15	Baik
3	Ruang Laboratorium	4	Baik
4	Lab. Komputer	2	Baik
5	Mushollah	1	Baik
6	Perpustakaan	1	Baik
7	Ruang Guru	1	Baik
8	Ruang Kelas Unggulan A	1	Baik
9	Ruang Kepala Sekolah	1	Baik
10	Ruang OSIS	1	Baik
11	Ruang Penyimpanan Data	1	Baik
12	Rumah Penjaga Sekolah	1	Baik
13	Tata usaha	1	Baik
14	Wc guru	2	Baik
15	Wc Siswa perempuan	2	Baik
16	Wc Siswa Laki-Laki	2	Baik
17	WC Tata Usaha	1	Baik
18	Lapangan Volly	1	Baik

Sumber. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

4.1.4 Kurikulum SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir

Kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir menggunakan kurikulum 2013. Adapun beban kurikulum tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel. 4.3 Beban Kurikulum IPA

NO	MATA PELAJARAN	KELAS		
		X	XI	XII
1	Pend. Agama	3	3	3
2	Bahasa Indonesia	4	4	3
3	Bahasa Inggris	4	2	2
4	Matematika	4	4	4
5	Fisika	3	4	4
6	Kimia	3	4	4
7	Biologi	3	4	4
8	Ekonomi	3	3	3
9	Geografi	3	3	3
10	Sosiologi			
11	PKN	2	2	2
12	PJOK	3	3	3
13	Seni Budaya	2	2	2
14	Sejarah Indonesia	2	2	2
15	Sejarah			
16	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
17	Muatan Lokal	2		
18	BK	2	2	2
19	Bahasa Asing			
20	Peminatan Matematika	3	3	4

Sumber. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Tabel 4.3 Beban Kurikulum IPS

NO	MATA PELAJARAN	JURUSAN IPS		
		X	XI	XII
1	Pend. Agama	3	3	3
2	Bahasa Indonesia	4	4	4
3	Bahasa Inggris	2	2	2
4	Matematika	4	4	4
5	Fisika	3		
6	Kimia	3		
7	Biologi	3		
8	Ekonomi	3	4	4
9	Geografi	3	4	4
10	Sosiologi		4	4
11	PKN	2	2	2
12	PJOK	3	3	3
13	Seni Budaya	2	2	2
14	Sejarah Indonesia	3	2	2
15	Sejarah		4	4
16	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
17	Muatan Lokal	2		
18	BK	2	2	2
19	Bahasa Asing	3	3	3
20	Peminatan Matematika	3	3	3

Sumber. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

4.1.5 Kerjasama SMA Negeri Kecamatan Kualuh Hilir

Kerjasama dengan stake holder yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir untuk peningkatan mutu pendidikan adalah kerjasama yang mendukung program sekolah. Adapun kerjasama tersebut adalah dengan

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pemerintah Kecamatan Kualuh Hilir, Puskesmas Kecamatan Kualuh Hilir, dan Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir.

4.2 Temuan Penelitian

4.2.1 Manajemen Pembiayaan Pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir.

Manajemen pembiayaan yang dilakukan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir menggunakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan visi dan misi sekolah. Rancangan anggaran yang dituangkan didalam Rancangan Anggaran Belanja Sekolah (RABS) sesuai dengan budget yang sudah ditentukan dengan menggunakan prinsip hemat, efisien. Hal ini sesuai dengan wawancara ibu kepala sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Yasma Ariamma Br. Guru Singa, S.Pd bahwa:

“Manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir menggunakan strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan pembiayaan pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir disusun dan tuangkan kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang terdiri dari RKAS BOS, RKAS BOP, dan RKAS SPP. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berisikan program kegiatan yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran belanja dan berisikan jumlah anggaran dalam suatu program kegiatan. Perumusan pembiayaan sekolah dituangkan kedalam RKAS sesuai dengan visi dan misi sekolah disusun sebelum tahun ajaran baru dimulai yang dilakukan melalui musyawarah sekolah yang melibatkan banyak pihak seperti kepala sekolah, perwakilan guru dan tata usaha, bendahara, wakil kepala sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan perwakilan wali siswa. Untuk merumuskan anggaran perlu nya kerjasama berbagai stakeholder agar tujuan sekolah bisa tercapai efektif. Prioritas perencanaan program di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir untuk mencapai tujuan sekolah adalah program pengembangan standar kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan pengembangan standar penilaian. kebutuhan pembiayaan yang cukup besar melebihi pemasukan keuangan yang ada baik yang bersumber dari dana BOS, BOP, dan SPP. Ada kegiatan pada RKAS Komite yang tidak terealisasi disebabkan SPP yang berasal dari Orangtua/wali siswa tersendat pembayarannya. Mengadakan / mengikuti

pendidikan dan pelatihan, seminar/webinar, Talk show bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, pengadaan buku siswa dan guru, pengadaan alat praktikum, pengadaan multimedia, pelaksanaan kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler dan kegiatan KSN, OSN, dan F2LS. Kendala pembiayaan yang dialami sekolah adalah pembiayaan yang cukup besar melebihi pemasukan keuangan yang ada, baik yang bersumber dari BOS, BOP, dan SPP”.

Pelaksanaan pembiayaan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir dilakukan dengan setiap program dan kebijakan yang dirumuskan didalam RKAS yang sudah disetujui dalam anggaran program RKAS melalui musyawarah sekolah. Hasil musyawarah tersebut diharapkan dapat menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai visi dan misi sekolah. Penentuan *budgeting* setiap program kegiatan harus ditetapkan untuk meningkatkan mutu sekolah. Pelaksanaan (*actuating*) adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja/pelaksana melakukan tugas dan kewajibannya. Hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Heri Iskandar Tanjung, S.E menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 kecamatan Kualuh Hilir menggunakan sitem Accunting. Dana yang bersumber dari BOS, BOP dan SPP dikelola oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Panitia (Tim) dengan kegiatan sebagai berikut : - Melaksanakan Pembelanjaan - Membuat Transaksi - Membuat Perhitungan - Membuat Pembukuan -,Mengawasi Pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku - Membuat Laporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan.Dana. pelaksanaan menggunakan prinsip transparansi dan keterbukaan pembiayaan. Pelaporan ditujukan kepada dinas setiap tiga bulan sekali dan kepada yayasan setiap akhir semester.dana yang persumber dari pemerintah untuk program pengembangan 8 standar nasional pendidikan. kegiatan yang timbul dalam proses pelaksanaan adalah penerimaan biaya pendidikan dan mengeluarkan biaya pendidikan. Proses accunting ini dicatat di pembukuan keuangan”.

Evaluasi pembiayaan Pendidikan atau yang sering disebut evaluation involves auditing, merupakan pertanggung jawaban terhadap keuangan sekolah menyangkut seluruh dana sekolah yang berkaitan dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan sekolah adalah dengan melihat keberhasilan suatu program kegiatan dan pengembangan program.

Keberhasilan program kegiatan yang ditanggungjawabkan kepada SDM yang sudah di amanahkan oleh pihak sekolah melalui musyawarah akan mendapatkan penghargaan berupa insentif tambahan dan akan diberdayakan untuk program pengembangan program yang lainnya. Proses evaluasi dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manajemen keuangan berjalan secara efektif dan efisien serta tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahadi Siregar, S.Pd.I, Gr menyatakan bahwa:

“Perencanaan pembiayaan dilaksanakan di awal tahun ajaran baru dengan musyawarah bersama guru dan komite sekolah. pengelolaan dengan menyusun perencanaan anggaran dengan musyawarah dan melakukan segala bentuk anggaran kedalam buku administrasi dan diawasi oleh kepala sekolah. Penetapan prosedur dilakukan oleh dinas itu yo selalu ada pembinaan tiap akhir bulan atau tri bulan itu ada monev (monitoring dan evaluasi) pembiayaan. Dari sekolah ya dari komite. Kepala sekolah yang dimonev, pelaksananya kan ya kepala sekolah. sistem evaluasi pembiayaan pendidikan di sekolah kami dengan melihat kinerja guru yang diamanahkan mengembangkan program kegiatan yang terdapat pada RKAS, kemudian apabila program kegiatan tersebut berhasil maka akan diberikan penghargaan. Apabila laporan kinerja kegiatan tidak berhasil maka dilakukan evaluasi program dan evaluasi Sumber Daya manusia. Penilaian evaluasi pembiayaan dilakukan dengan menugaskan SDM yang memenuhi kriteria dan keberhasilannya diukur dengan penilaian kinerja guru.

4.2.2 Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir

Pendanaan pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir berasal dari tiga sumber pembiayaan yaitu pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan wali siswa. Tujuan dari pendanaan pendidikan adalah meminimalisir kendala dana dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara sekolah bapak Abdul Halim Nababan, S.Pd menyatakan bahwa:

“Pendanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara berasal dari anggaran Pemerintah Pusat yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan sumbangan wali siswa yaitu Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). jumlah anggaran disetiap tahun untuk BOS yaitu Rp. 1.500.000,00 per siswa BOP Rp. 40.000,00 per siswa untuk satu tahun

anggaran. Untuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan dari wali siswa Rp. 40.0000,00 persiswa untuk setiap bulan. kalau masalah itu wewenang kepala sekolah dalam menentukan kebijakan program, biasanya focus utama nya adalah pengadaan buku, pratikkum, pengembangan multimedia, pengembangan sarana prasarana, dan pengembangan guru. Realisasi anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan digunakan untuk peningkatan Standar Nasional Pendidikan. menurut saya, pengendalian yang dilakukan disekolah ini adalah ada 2 yaitu pengendalian internal dan eksternal. pengendalian internal dilakukan oleh ketua komite berupa laporan pertanggung jawaban kepada wali siswa dengan musyawarah, sedangkan pengendalian eksternal dilakukan oleh inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumatera Utara. yang dilibatkan proses pengendalian tersebut adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Proses pengendalian dilakukan oleh inspektorat terkadang setiap triwulan dan terkadang setiap semester”.

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua. Tanggung jawab pemerintah memberikan dana penyelenggaraan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab sosial yang diemban oleh negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. Perwujudan tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dinyatakan dalam pengalokasian dana pendidikan oleh pemerintah (APBN) sebesar 20%.

Tabel. 4.4 Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir

JENIS PENDANAAN	SUMBER	JUMLAH SISWA	SATUAN PER SISWA	JUMLAH 1 TAHUN
Pemerintah Pusat	BOS	485	1.540.000	Rp.746.900.000
Pemerintah Provinsi	BOP	485	40.000	Rp.19.400.000
Wali Siswa	SPP	485	40.000	Rp.19.400.000

Sumber: Bendahara sekolah

Pendanaan pendidikan yang berasal dari bantuan pemerintah yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki jumlah Rp. 746.000.000,00- . Realisasi anggaran sebanyak tiga kali pencairan dalam satu tahun anggaran. Penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir di prioritaskan untuk program kegiatan pengembangan kompetensi lulusan yang meliputi kegiatan evaluasi pembelajaran dan kegiatan evaluasi pembelajaran sebesar 5,1 %, program kegiatan pengembangan kompetensi isi meliputi kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar 1,5 %, program kegiatan pengembangan standar proses meliputi penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, sebesar 14,3 %, program kegiatan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pengembangan profesi guru dan manajemen sekolah sebesar 0,3 %, pengembangan program kegiatan sarana dan prasarana meliputi perbaikan laboratorium biologi, belanja peralatan dan mesin sebesar 27,1 %, pengembangan standar pengelolaan sebesar 0,2 %, pengembangan standar pembiayaan meliputi pengelolaan sekolah dan honor pendidik dan tenaga pendidikan yang bersumber dari BOS sebesar 50,1 %, program pengembangan standar penilaian meliputi evaluasi pembelajaran sebesar 1,4 %.

Pendanaan pendidikan yang berasal dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir digunakan untuk tambahan penghasilan kepala sekolah sebesar 5 %, tambahan penghasilan guru PNS yang bertugas di Sekolah Negeri dan tidak dapat Tunjangan Profesi Guru sebesar 15 %, Honorarium Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang belum ditampung Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 35 %, Honorarium Tenaga Layanan Khusus Non PNS yang belum ditampung Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 15 %, dan kebutuhan operasional sekolah yang belum ditampung Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 30 %.

Pendanaan yang bersumber dari wali siswa direalisasikan untuk memenuhi biaya proses yang meliputi gaji guru yang tidak menerima dari BOS, BOP, maka dianggarkan ke iuran wali siswa. Realisasi anggaran yang lain adalah digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler, surat perintah perjalanan dinas ke luar kota, gaji

wali kelas, dan tunjangan wakil kepala sekolah. Besar pendanaan yang bersumber dari wali siswa adalah Rp.40.000,00- setiap bulannya yang dikelola oleh komite sekolah yang sudah disetujui pada musyawarah komite. Untuk mendukung program kegiatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir.

Hal yang perlu mendapat perhatian ialah pendanaan menyangkut keperluan sekolah, seperti biaya kegiatan kesiswaan, kegiatan kurikulum, tagihan listrik, ledeng, langganan koran, majalah dan internet, petugas sampah dan cleaning service. Tidak kalah adanya tuntutan menyangkut honor guru tidak tetap (honorer) dan instruktur ekstrakurikuler, insentif guru, pembelian peralatan kegiatan belajar, pemeliharaan gedung, dan penyelesaian sarana dan prasarana sebagaimana diprogramkan dalam RAPBS.

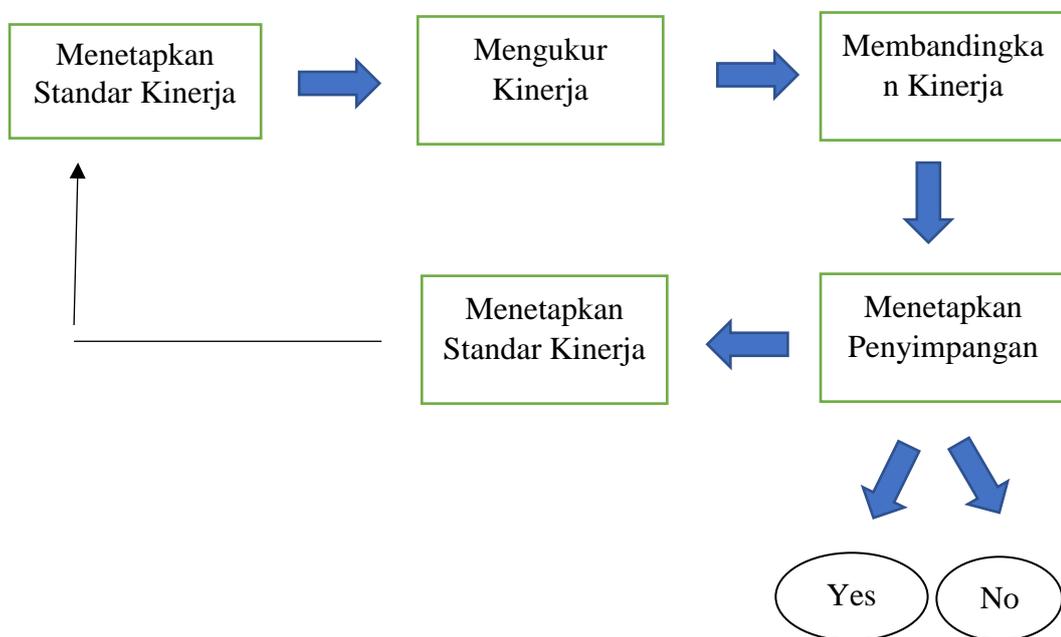
4.2.3 Pengendalian Pembiayaan Pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir.

Hasil wawancara dengan bendahara sekolah SMA Negeri 1 Kualuh Hilir Bapak Abduh, S.Pd pengendalian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan SMA Negeri 1 Kualuh Hilir adalah:

“Pengendalian biaya yang berasal dari pemerintah yang dilakukan di SMA negeri 1 Kualuh Hilir menggunakan sistem pengendalian internal yang diawasi oleh cabang dinas pendidikan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Pengendalian Internal dilakukan oleh Inspektorat dan BPK Provinsi Sumatera Utara. Prioritas pengendalian internal adalah aset sekolah dan program pembiayaan sekolah oleh pengawasan cabang dinas pendidikan. Yang terlibat dalam proses pengendalian adalah kepala sekolah, bendahara, dan wakil kepala sekolah. Proses pengendalian untuk meningkatkan mutu disekolah menggunakan tahapan pemetaan, perencanaan, evaluasi, dan penetapan standar. sasaran yang menjadi pengendalian pembiayaan adalah perencanaan pembiayaan dana BOS dilakukan oleh cabang dinas pendidikan kota Tanjung Balai sedangkan SPP dilakukan oleh komite sekolah. Selain itu mengenai aspek Sarana dan Prasarana”.

Siklus pengendalian eksternal di SMA Negeri 1 Kualuh Hilir dilakukan melauli tahapan perumusan standar kinerja, mengukur kinerja, membandingkan

kinerja dan perbaikan. Pengendalian internal dilakukan oleh komite sekolah dan kepala sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu internal. Pelaporan yang dilakukan komite sekolah adalah pelaporan berbasis akuntan melalui pertemuan bersama antara komite sekolah dengan kepala sekolah yang biasa dilakukan secara berkala setiap semester membahas laporan anggaran dan program pengembangan program non akademis. Untuk lebih jelas tentang siklus pengendalian yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kualuh Hilir dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah ini:



Gambar. 4.1 Siklus Pengendalian dan pengawasan SMA Negeri 1 Kualuh Hilir

Sumber: Peneliti

4.2.4 Tanggapan Guru Terhadap Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir.

Hasil wawancara dengan salah satu guru bapak Redo S.Pd menyatakan bahwa:

“Guru melakukan kompetensi perangkat pembelajaran dalam penyusunan perangkat pembelajaran yaitu RPP, Prota, Prosem dan Silabus dalam menyusun perangkat pembelajaran. Setiap penyusunan perangkat pembelajaran disusun secara beresama-sama seluruh dewan guru. guru

melakukan penilaian sikap berupa sikap menghormati, gotong royong, sikap mengamalkan agama islam, dan nilai-nilai pancasila dan dituangkan kedalam RPP. Guru melakukan penilaian kepada peserta didik dengan menggunakan teknik penilaian diri, penilaian antar siswa, proyek, portofolio, dan produk. kepala sekolah memberikan bimbingan untuk penyusunan perangkat pembelajaran kepada guru dengan memfasilitasi dan menentukan waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh wakasek Kurikulum. Dalam melakukan pengembangan dan pelatihan yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru adalah dengan membuat pelatihan pembuatan RPP berbasis HOTS, dan Penilaian Siswa dengan mengundang pemateri dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai”.

Hasil wawancara dengan guru lain yaitu bapak Syopian Syani, S.Pd menyatakan bahwa:

“Kepala sekolah memfasilitasi dan mendukung dalam mengikuti berbagai program untuk pengembangan kompetensi seperti uji kompetensi guru, pelatihan kurikulum merdeka belajar, program guru penggerak, pelatihan pengelolaan kelas, penggunaan media pembelajaran. Tindak lanjut guru setelah mengikuti pelatihan adalah dengan menerapkan media dalam pengelolaan kelas, dengan pembelajaran berpusat kepada murid. Guru menggunakan media bergantung kepada gurunya. Jika guru yang mengampu mata pelajaran MIPA tidak hanya alat peraga saja dan media tetapi menggunakan laboratorium seperti mata pelajaran Biologi, Fisika, Kimia. Kepala sekolah melakukan evaluasi setiap semester terhadap program kegiatan dengan memberikan penghargaan kepada guru berprestasi dan melakukan perbaikan program yang belum berhasil. Untuk melakukan pengembangan terhadap lulusan kepala sekolah memberikan program ekstrakurikuler berupa Paskibraka Kecamatan dan Kabupaten, Program Mahir menggunakan Komputer, Program Sholat Dhuha, program Lulusan berkarakter”.

4.2.5 Tanggapan Wali Siswa Terhadap Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir.

Tanggapan wali siswa terhadap pembiayaan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir adalah tanggapan yang berasal dari orang tua siswa yang menjadi peserta rapat komite dan mendukung program sekolah. Hasil wawancara dengan bapak Herman Munthe selaku Ketua Komite SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir adalah:

“Pendapat saya mengenai pembiayaan yang dibuat oleh kepala sekolah sudah bagus ada kemajuan rehab gedung, penambahan ruang kelas, dan penyetaraan gaji guru yang bersumber dari komite sekolah. kepala sekolah

melakukan pengawasan pendanaan yang bersumber dari komite sekolah. prioritas pendanaan yang berasal dari komite sekolah adalah untuk gaji guru, menambah kursi dan meja yang rusak, pembangunan fasilitas sekolah, dan biaya perjalanan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. dana komite persiswa dikenakan biaya sebesar Rp. 40.000 perbulan sesuai kesepakatan. proses pertanggungjawaban dana komite adalah dengan mempertanggungjawabkan dan melaporkan dana disetiap akhir semester dibahas dalam rapat akhir semester kepada walisiswa. sekolah ini sudah bagus dan tertib semenjak kepemimpinan kepala sekolah bk yasma ini. Tidak banyak siswa yang berkeliaran lagi, dan banyak yang sudah berprestasi”.

Dukungan dalam bentuk dana tentunya sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat, orang tua, pengurus komite serta dari sekolah itu sendiri yang meliputi sumbangan dalam bentuk uang. Misalnya dalam bentuk sumbangan uang berupa sumbangan awal masuk tahun ajaran baru serta iuran bagi siswa yang lama, hal ini dapat terlihat dari upaya komite sekolah dengan cara memberikan dorongan untuk mempertinggi komitmen orang tua untuk perkembangan sekolah, peningkatan mutu pendidikan dan menjalin kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat maupun orang tua siswa.(Hayani 2015)

Kedudukan komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 dalam Keputusan Mendiknas tersebut dinyatakan bahwa peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan: (1) advisory agency (pemberi pertimbangan), (2) supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan) dan (4) mediator, penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. (Hayani 2015)

4.2.6 Peningkatan Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir

Berdasarkan temuan penelitian ini untuk meningkatkan mutu sekolah dipengaruhi oleh mutu program kegiatan, mutu pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, mutu pembelajaran, tenaga kependidikan yang berintegritas, kualitas pendidik dan prestasi siswa. Keberhasilan mutu program kegiatan berbanding lurus

dengan jumlah biaya yang diberikan untuk program kegiatan tersebut. Objek keberhasilan dari penentuan pembiayaan yang telah disepakati oleh tenaga kependidikan dan pengelolaan pembiayaan sekolah yang telah diberikan pemerintah adalah keberhasilan siswa mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pembelajaran dan prestasi siswa.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui Badan Nasional Pendidikan Nasional (BNPN). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi
- 3) Standar Proses
- 4) Standar Penilaian
- 5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Pengelolaan
- 7) Standar Sarana dan Prasarana, dan
- 8) Standar Pembiayaan

Ukuran keberhasilan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator proses, output, outcome dan dampak. Meningkatnya kemampuan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir diidentifikasi peneliti adalah adanya perubahan pengelolaan satuan pendidikan. Adanya kebijakan yang mengacu pada SNP, meningkatnya kemampuan dalam hal merencanakan dan melaksanakan rencana pemenuhan mutu yang disusun untuk memonitor dan mengevaluasi mekanisme yang telah ada.

Terwujudnya peningkatan mutu sekolah pada satuan pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir, yang ditunjukkan pada kompetensi pendidik

dalam menjalankan proses pembelajaran mulai dari perencanaan hingga penilaian, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana keuangan, kerjasama dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah SDM yang berperan dalam meningkatkan mutu sekolah harus diimbangi juga dengan program sekolah yang bermutu yang berprinsipkan transparan, adil, dan jujur agar tujuan sekolah dapat tercapai maksimal.

Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan ruti catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat- menyurat dengan segala aspeknya serta mempersiapkan laporan. Jadi, jika diatas dikatakan bahwa pendidik adalah guru. maka administrasi yang dimaksud disini adalah perangkat pembelajaran. Apa saja yang harus disiapkan oleh guru berkaitan perangkat atau administrasi pembelajaran yaitu sebagai berikut:

Tenaga kependidikan adalah Orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan seperti wakil kepala sekolah, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, dan petugas keamanan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materiil, maupun spirituil untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan temuan penelitian diperoleh informasi bahwa mutu sekolah teridentifikasi sangat baik. Hal ini didasari pada program standar kompetensi lulusan dengan pembiayaan yang relevan dan prestasi siswa di SMA Negeri 1

kecamatan Kualuh Hilir dapat meningkat. Identifikasi tersebut dapat dilihat siswa yang lulus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui berbagai jalur penerimaan PTN, fasilitas pembelajaran, guru melakukan perencanaan dan evaluasi pembelajaran, dan peningkatan hasil belajar peserta didik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5 Siswa SMA Negeri 1 Kualuh Hilir diterima di PTN

NO	TAHUN	JUMLAH SISWA	JALUR PENERIMAAN	KETERANGAN
1	2020	15	SNMPTN, MANDIRI, BEA SISWA MOU	UNIMED, UINSU, UNP, IAIN PADANG SIDEMPUAN
2	2021	10	SNMPTN, MANDIRI, BEA SISWA MOU	UNIMED, UINSU, USU
3	2022	6	SNMPTN	UINSU, UNIMED

Sumber: Data Tata usaha

Manajemen biaya pendidikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana prasana pendidikan, pengadaan alat-alat pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, dan hal lain yang berkaitan dengan kependidikan. Secara teoritis konsep biaya pendidikan sama dengan di bidang lain, yaitu lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang lulusan. (Djuwairiyah, Muqit, and Listiana 2021)

Manajemen pembiayaan menjadi niscaya untuk melahirkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, yaitu pendidikan yang mampu menjawab berbagai

tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif, kondusif dan efisien. (Djuwairiyah, Muqit, and Listiana 2021)

Fasilitas pembelajaran merupakan faktor lain yang mempengaruhi mutu sekolah. Dalam pencapaian mutu sekolah, fasilitas pembelajaran merupakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Pemanfaatan fasilitas pembelajaran perlu dikelola dengan baik agar terhindar dari pemborosan dan tidak tepatnya pemanfaatan fasilitas. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan prinsipnya agar peningkatan mutu sekolah dapat tercapai. (Azhari and Kurniady 2016)

4.3 Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan-temuan penelitian diatas manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir menggunakan strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk mencapai tujuan yang optimal perencanaan sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang baik. Perencanaan anggaran disekolah tersebut dituangkan kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS), yang terdiri dari RKAS Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan RKAS Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) disepakati dalam musyawarah kerja kepala sekolah yang ditentukan sebelum tahun ajaran baru dimulai yang melibatkan banyak pihak. Menurut (Anwar, 1991) Pengelolaan pembiayaan pendidikan sama dengan manajemen pembiayaan, dan pengelolaan mempunyai tiga fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pelaksanaan pembiayaan disekolah tersebut menggunakan prinsip akuntabilitas publik dimana pengembangan program kegiatan pengembangan pendidikan ditunjuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang loyalitas, berintegritas, dan mempunyai kepemimpinan yang baik. Agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendidikan didalam program kegiatan pengembangan pendidikan

diperlukan laporan berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilaporkan ke cabang dinas pendidikan menggunakan sistem online dengan belanja aset sekolah menggunakan sistem silva. Agar pelaksanaan pembiayaan pendidikan berjalan baik sesuai dengan visi dan misi sekolah maka perlunya evaluasi pembiayaan dengan menggunakan evaluasi program yang dievaluasi setiap semester.

Pelaporan pembiayaan pendidikan adalah kewajiban lembaga pendidikan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan unit atau satuan pendidikan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa kepatutan dan keadilan. Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning. Memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Evaluasi pada administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan.

Evaluasi yang dilakukan sekolah di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir adalah dengan melihat keberhasilan suatu program kegiatan dan pengembangan program. Keberhasilan program kegiatan yang ditanggungjawabkan kepada SDM yang sudah di amanahkan oleh pihak sekolah melalui musyawarah akan mendapatkan penghargaan berupa insentif tambahan dan akan diberdayakan untuk program pengembangan program yang lainnya.

Biaya pendidikan, menurut Supriyadi (2003), merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental-input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Menurut Nanang Fattah (2009) biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan,

pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. (Sudarmono et al. 2021)

Pendanaan pendidikan nasional diatur dalam satu bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu bab XIII, pasal 46, 47, 48, 49. Bab ini mengatur tentang tanggung jawab pendanaan (pasal 46), sumber pendanaan (pasal 47), pengelolaan dana pendidikan (pasal 48), dan pengalokasian dana pendidikan (pasal 49). Dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah (pusat), Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Dalam hal ini masyarakat diartikan sebagai kelompok warga negara Indonesia, non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian masyarakat harus dibedakan dengan orang tua peserta didik atau dengan peserta didik (pasal 1 butir 7, 28, 29, 44, dan 46). (Tamam 2018)

Realisasi anggaran pemerintah berdasarkan temuan penelitian di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara direalisasikan untuk peningkatan mutu pendidikan yang mencakup delapan Standar Nasional Pendidikan. Pendanaan disekolah tersebut bersumber dari pendanaan pemerintah yang meliputi Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) dan (BOP). Berdasarkan uraian temuan penelitian diatas pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Keterbatasan dana yang bersumber dari pemerintah membuat sekolah mengambil kebijakan membuat sumber pendanaan yang bersumber dari wali siswa atau masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pendidikan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 ayat 1 yang berbunyi masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas maka peningkatan mutu pendidikan di sekolah ditentukan berdasarkan sumber biaya pendidikan. Temuan penelitian tersebut sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal Pasal 46 ayat 1, 2 dan 3, pasal 47 ayat 1, 2, dan 3.

Seharusnya dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD harus ditingkatkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 49 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Meningkatnya dana pendidikan sebagaimana yang ditentukan oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas serta melakukan efisiensi penggunaan dana pendidikan merupakan alternatif yang sangat strategis menuju terealisasinya konsep pendidikan yang terjangkau untuk rakyat. (Tamam 2018).

Dana pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir yang berasal dari Bantuan Pemerintah Pusat yaitu BOS untuk tahun ajaran 2021/2022 adalah sebesar Rp. 746.900.000. pendanaan yang berasal dari BOP tahun ajaran baru 2021/2022 adalah $485 \times 40000 = \text{Rp. } 19.400.000$ selama satu tahun berarti jumlah anggaran adalah sebesar Rp.232.800.000. sedangkan bantuan yang berasal dari bantuan sumbangan wali siswa persatu tahun adalah $40.000 \times 485 = \text{Rp. } 232.800.000$ dibayar setiap bulan sekali oleh peserta didik.

Dalam realisasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah dicairkan dalam satu tahun anggaran adalah sebanyak tiga kali pencairan sesuai dengan kebutuhan sekolah setiap bulannya. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicairkan dengan proses pencairan setiap triwulan sesuai kebutuhan sekolah, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) direalisasikan kesekolah setiap enam bulan atau setiap semester

melalui bank penyalur yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang berasal dari wali siswa direalisasikan setiap bulan melalui pembayaran SPP siswa setiap bulannya. Kendala yang dihadapi dalam hal pendanaan di SMA Negeri 1 kecamatan Kualuh Hilir adalah mendahulukan dana kebutuhan setiap bulannya dan banyaknya siswa yang terlambat dalam hal pembayaran SPP.

Menurut Permendikbud No.06 tahun 2021 Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi sekolah menggunakan dan BOS reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan disekolah meliputi komponen:

- 1) Penerimaan peserta didik baru
- 2) Pengembangan perpustakaan
- 3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- 4) Pelaksanaan kegiatan asmsen dan evaluasi
- 5) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
- 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- 7) Pembiayaan langganan daya dan jasa
- 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- 9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- 10) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- 11) Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan
- 12) dan/atau pembayaran honor.

Kepala sekolah melalui bendahara harus melakukan pembukuan yang ditulis secara manual. Pembukuan yang harus disusun oleh sekolah:

- 1) RKAS
- 2) buku kas umum
- 3) buku pembantu kas
- 4) buku pembantu bank
- 5) buku pembantu pajak; dan
- 6) dokumen lain yang diperlukan, serta lampiran semua buku.

Proses akuntansi akan terus berulang setiap periodenya mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan yang berulang ini disebut proses akuntansi atau lebih sering dikenal dengan siklus akuntansi.(Putri 2021). Tahapan terakhir dari proses akuntansi adalah pelaporan, seperti :

- 1) Menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.
- 2) Menganalisa hasil laporan keuangan, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.

Pengendalian merupakan proses yang mengarahkan setiap orang dalam suatu organisasi agar melakukan kegiatan yang tertuju untuk menjamin agar program pengembangan dan program pendidikan dilakukan sesuai dengan rencana sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif (Niron 2019). Sasaran pengendalian menurut (Niron 2019) adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila setiap akhir bulan, Menteri melakukan rapat koordinasi untuk meminta laporan pelaksanaan anggaran dari unit di bawahnya, itu merupakan salah satu kegiatan pengendalian yang dilakukan di tingkat Departemen Pendidikan Nasional.
- 2) Pengendalian di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten dilakukan oleh Kepala Dinas masing-masing.
- 3) Dalam kerangka manajemen pendidikan berbasis sekolah (school based management) pengendalian internal sekolah/madrasah dapat dilakukan secara internal oleh kepala sekolah/madrasah sendiri dan secara eksternal oleh komite sekolah, yayasan/pesantren, pengawas, dan kantor dinas pendidikan atau Departemen Agama kabupaten/kota yang mengelola bidang pendidikan.

Teknis pengendalian menurut (Niron 2019) adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pengendalian pendanaan, setidaknya- tidaknya dilakukan melalui pengendalian personel pengelolanya, penggunaan pendanaannya, dan sistem akuntansinya.

- 2) Personel pengelola dana pendidikan harus dipisahkan; petugas yang mengambil keputusan tentang penggunaan dana pendidikan (pejabat pembuat komitmen), yang memegang keuangan (bendahara pemegang uang), dan yang menyelenggarakan administrasi keuangannya (bendahara pencatatan uang).

Indra Bastian (2015: 160) menyebut dana pendidikan sebagai sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan biaya pendidikan adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk mendanai berbagai kegiatan pendidikan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pengendalian merupakan proses yang mengarahkan setiap orang dalam suatu organisasi agar melakukan kegiatan yang tertuju untuk menjamin agar program pengembangan dan program pendidikan dilakukan sesuai dengan rencana sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif. Tujuan pengendalian dalam hal pendanaan pendidikan ditujukan untuk memobilisasi dan mengarahkan agar setiap orang dalam organisasi mengelola dana pendidikan sesuai dengan rencana (penggalan sumber-sumbernya ataupun rencana penggunaannya).

Pengendalian terhadap penggunaan dana pendidikan pada lembaga pengelola pendidikan dilakukan berdasarkan dokumen rencana kerja anggaran (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga=RKA- KL) pada lembaga pengelola dan penyelenggaraan pendidikan dan RAPBS/M pada satuan pendidikan, yang sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan, yang menyangkut:

- 1) Jenis anggaran (belanja rutin atau belanja investasi)
- 2) Kategori peruntukan (belanja barang, gaji dan honorarium, belanja habis pakai, dan belanja lain-lain)
- 3) Plafon maksimal yang boleh dilakukan (pagu yang ditetapkan untuk setiap kegiatan/program), serta
- 4) Cara pembelanjannya (swa-kelola atau kontrak).

BAB V

Simpulan, Implikasi, dan Saran

5.1 Simpulan

Bedasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir diperlukan strategi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah digunakan untuk meningkatkan mutu outcome, output, dan input. Perencanaan pembiayaan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir dituangkan kedalam RKAS BOS, BOP, dan SPP yang disusun sebelum tahun ajaran baru dimulai. Pelaksanaan manajemen pembiayaan disekolah tersebut menggunakan sistem online dengan accunting. Sedangkan Evaluasi yang dilakukan sekolah adalah dengan melihat keberhasilan suatu program kegiatan dan pengembangan program dan memberikan penghargaan kepada kinerja guru yang berhasil.
- 2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dan Orang Tua. Besar sumber dana yang berasal dari pemerintah yang terdiri dana BOS sebesar Rp. 1.500.000,00- persiswa, BOP sebesar Rp. 40.000,00- persiswa dan SPP sebesar Rp. 40.000,00- persiswa dibayar setiap bulan. Pendanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir direalisasikan untuk peningkatan Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah ditentukan berdasarkan sumber biaya pendidikan sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal Pasal 46 ayat 1, 2 dan 3, pasal 47 ayat 1, 2, dan 3.
- 3) Pengendalian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir menggunakan pengendalian internal yang diawasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara untuk pendanaan

yang berasal dari Pemerintah, sedangkan pengendalian internal yang bersumber dari masyarakat dilakukan oleh wali siswa yang digunakan untuk peningkatan mutu guru. Pengendalian merupakan proses yang mengarahkan setiap orang dalam suatu organisasi agar melakukan kegiatan yang tertuju untuk menjamin agar program pengembangan dan program pendidikan dilakukan sesuai dengan rencana sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif.(Niron 2019)

5.2 Implikasi

1) Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Manajemen pembiayaan yang mempunyai strategi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi yang baik dapat memberikan implikasi bagi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir. Implikasi manajemen pembiayaan bagi peningkatan mutu tersebut adalah meningkatnya mutu lulusan, mutu sarana dan prasarana, mutu sumber daya manusia, mutu penilaian, mutu pembiayaan, dan mutu pengelolaan.

2) Pendanaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Sumber pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46 dan 47 dapat berimplikasi bagi SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir berupa pengembangan program kegiatan yaitu pengembangan Ekstrkurikuler dan pelayanan sekolah.

3) Pengendalian Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir kepala sekolah melaksanakan accounting keuangan dengan proses akuntansi yaitu pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan dari transaksi untuk menghasilkan informasi yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan.menggunakan team accounting dengan pengendalian internal. Dalam implementasinya

pengendalian internal diawasi oleh cabang dinas pendidikan kota tanjung balai yang dilakukan oleh inspektorat.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan atau pihak terkait diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyusunan dan pembuatan RKAS.
- 2) Dinas pendidikan diharapkan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan secara intensif dan kontinyu untuk mengetahui ketetapan penggunaan anggaran dan akuntabilitasnya.
- 3) Perlu Adanya Usaha Dan Kreativitas Dalam Mengatasi Kekurangan Dana Sekolah.
- 4) Realisasi pemanfaatan dana harus di sesuaikan dengan kebutuhan sekolah, sehingga program bantuan operasional sekolah benar-benar dapat memenuhi kebutuhan sekolah serta meningkatkan mutu dan tujuan sekolah
- 5) Sekolah harus terbuka atau transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Kendala yang timbul hendaklah segera secepat mungkin, dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait sesuai pedoman atau petunjuk teknis yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi dalam Upaya Peningkatan Mutu*, STAI Daruttaqwa. Gresik. In *Jurnal Penjamin Mutu* (Vol. 3, Issue 1). <http://www.ejournal.ihtn.ac.id/index.php/JPM/article/view/95>
- Akrim. (2021). *STRATEGI PENINGKATAN DAYA MINAT BELAJAR SISWA Belajar PAI Mencetak Karakter Siswa* (E. Sulasmi (Ed.); Cetakan I). CV. Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta.
- Arifah, U. (2018). *Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan*. Cakrawala: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, IAINU Kebumen, 2(1), 17–37. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37>
- Arwildayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. In U. Kuswandi (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 110, Issue 9). Widya Pdajajaran, Bandung.
- Aulia, R. (2013). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Universitas Negeri Padang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). *Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, UPI BANDUNG, 23(2), 26–36.
- Busri, J. I. (2019). *Pengertian Administrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*. 1–6.
- Chaeriah MM, E. S. (2016). *Manajemen Berbasis Mutu*. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 4(2). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v4i2.45>
- Danang.S;Nugraha.S;Dkk. (2016). *Manajemen Pendidikan*, Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (Riduan (Ed.); Cetakan Ke). Alfabeta, Bandung. <https://doi.org/Abid>
- Darwin. (2021a). *Pelaporan keuangan pendidikan dan pengendaliannya*.
- Darwin. (2021b). *Penganggaran dan Keuangan Pendidikan*. 2012.
- Darwin. (2021c). *Sistem Audit Keuangan Pendidikan*.
- Destiani, P. (2019). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIEN PARUNG BOGOR TESIS*. INSTITUT

PTIQ JAKARTA.

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2018). Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat Sekolah Menengah Pertama. Kemdikbud, 021, 57946062–57946063.
- Djuwairiyah, Muqit, A., & Listiana, H. (2021). *Manajemen Pembiayaan Dalam Mutu Pendidikan*. Journal MULTICULTURAL of Islamic Education, 4(2), 81–92.
- Dr. Vladimir, V. F. (1967). *BAB II Pembiayaan dan Pengendalian Pendidikan*. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local., 1(69), 5–24.
- Emilda, S. (2020). MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN (D. Syafitri (Ed.); I). Rajawali Pers, Depok.
- Fakultas, S., Pendidikan, I., Negeri, U., Abtrak, S., Nasional, P. P., Kunci, K., Pendidikan, P., Pendidikan, P. P., Pendidikan, M., & Suryadi, A. (1999). *P e r m a s a l a h a n m u t u p e n d i d i k a n d a l a m p e r s p e k t i f p e m b a n g u n a n p e n d i d i k a n*.
- Gunawan, I. (2013). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Pendidikan, 143. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Hariyani, D. santi. (2015). *Manajemen Keuangan 1 Edisi Revisi*, UNIPMA PERS, Madiun. 0–118.
- Huberman, & Miles. (1992). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998).
- Iryana, R. S. (1990). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, Ekonomi Syariah STAIN SORONG*. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, 4(1).
- Kurniawan, R. Y. (2016). Identifikasi Permasalahan Pendidikan Di Indonesia Untuk. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun*, May, 1415–1420. KURNIAWAN, Riza Y. Identifikasi permasalahan pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia*, 2016, 1415-1420.
- Luis, F., & Moncayo, G. (n.d.). *Manajemen Pembiayaan Terpadu*, Pascasarjana IAIN PONOROGO. 1–19.
- Marwan, E. (2022). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah*. Al-

- Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran, 12(2), 1–10.
<https://doi.org/10.55558/alihda.v12i2.2>
- Muhammad, F. (2019). Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*, 53(9), 1689–1699.
- Nasional, U. S. P. (2003). Undang-undang sistem pendidikan nasional.
- Niron, M. D. (2019). Pengendalian / pengawas an keuangan pendidikan. *Ilmu Pendidikan*.
- Pascasarjana Umsu. (2019). Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Pascasarjana Umsu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang STandar Nasional Pendidikan (Issue 2). (2005).
- Putri, shepti D. (2021). *Pengantar Akuntansi. Pengantar Akuntansi*, September, 1–13.
- RIAU, U. S. (n.d.). Ii, B A B Pendidikan, A Mutu Pendidikan, Pengertian Mutu. 10–47.
- Samiyah. (2016). MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MUTU PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA). UIN MAULANA MALIK IBRAHIM, Malang.
- Semarang, S. P. U. W. (2015). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dii MA AL-Irsyad Gajah Demak*.
- Sonedi, S., Jamalie, Z., & Majeri, M. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat. Fenomena*, 9(1), 25.
<https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702>
- Tamam, B. (2018). *Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah. Kajian Islam Dan Masyarakat*, 02, 35–48.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Tius, R., Margareta, E., Pendidikan, M. M., Kristen, U., Wacana, S., Ismanto, B., Pendidikan, M. M., Kristen, U., & Wacana, S. (2017). *Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri*. *Manajemen Pendidikan*, 2, 195–204.

- Wahyudi, U. R. (2012). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (H. Permana (Ed.)). Deepublish. Yogyakarta.
- Yulianti, E. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP*. *Manajemen Pendidikan, Kediri*, 11(4), 296–303.
- Yunita, I. (2021). *Konsep Pengendalian Internal Sebagai Upaya Meminimalisir Tagihan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Swasta*. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, STEBI Syaikona Kholil Sidogiri PASURUAN*, 18 No.3(85), 836–851.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4111/2951>

Lampiran 1

Catatan Hasil Wawancara

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 1

Nama Informan : Yasma Ariamma Br. Guru Singa, S.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Hari Tanggal : 21 Maret 2022

Kode Informan : R1

Focus Penelitian : Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembiayaan Pendidikan

1. P : Bagaimana strategi pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir?
R1 : Strategi pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir menggunakan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. P : Bagaimana perencanaan pembiayaan disekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan?
R1 : Perencanaan pembiayaan dituangkan kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun sebelum tahun ajaran baru. RKAS tersebut terdiri dari RKAS BOS, BOP, dan SPP.
3. P : Apa yang menjadi fokus utama perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah?
R1 : perencanaan disusun berdasarkan musyawarah RKAS yang dihadiri oleh perwakilan guru, walisiswa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, ketua komite, dan perwakilan tata usaha untuk menentukan anggaran dan visi misi sekolah. Yang menjadi fokus utama adalah program pengembangan pendidikan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
4. P : apa saja yang menjadi kendala pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut?
R1 : kebutuhan pembiayaan yang cukup besar melebihi pemasukan keuangan yang ada baik yang bersumber dari dana BOS, BOP, dan SPP. Ada kegiatan pada RKAS Komite yang tidak terealisasi disebabkan SPP yang berasal dari Orangtua/wali siswa tersendat pembayarannya.
5. P : Untuk meningkatkan mutu program apa saja yang ibu buat untuk sekolah?
R1 : Mengadakan / mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar/webinar, Talk show bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, pengadaan buku siswa dan guru, pengadaan alat pratikum, pengadaan

multimedia, pelaksanaan kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler dan kegiatan KSN, OSN, dan F2LS.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 2

Nama Informan : Heri Iskandar Tanjung, S.E

Jabatan : Kepala Tata Usaha

Hari Tanggal : 21 Maret 2022

Kode Informan : R2

Focus Penelitian : Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembiayaan Pendidikan

1. P : Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir untuk meningkatkan mutu pendidikan
R2 : pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 kecamatan Kualuh Hilir menggunakan sitem Accunting?
2. P : Bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir?
R2 : Dana yang bersumber dari BOS, BOP dan SPP dikelola oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Panitia (Tim) dengan kegiatan sebagai berikut : - Melaksanakan Pembelanjaan - Membuat Transaksi - Membuat Perhitungan - Membuat Pembukuan -,Mengawasi Pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku - Membuat Laporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan.Dana.
3. P : Apakah pelaksanaan menggunakan prinsip transparansi dan keterbukaan pembiayaan?
R2 : iya menggunakan keterbukaan dan prinsip transparan.
4. P : Bagaimana pelaporan keuangan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir?
R2 :Pelaporan ditujukan kepada dinas setiap tiga bulan sekali dan kepada yayasan setiap akhir semester
5. P :Program kegiatan yang danaya bersumber dari pemerintah, program apa saja yang dikembangkan?
R2 : dana yang persumber dari pemerintah untuk program pengembangan 8 standar nasional pendidikan.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 3

Nama Informan : Abdul Halim Nababan, S.Pd

Jabatan : Bendahara

Hari Tanggal : 22 Maret 2022

Kode Informan : R3

Focus Penelitian : Pendanaan dan Pengendalian Pembiayaan.

1. P : Apa saja yang menjadi sumber pendanaan di sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara?
R3 : Menurut saya, sumber pendanaan di sekolah ini terdapat dua sumber yaitu yang berasal dari pemerintah meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Yang kedua sumber pendanaan yang berasal dari iuran wali siswa untuk sumbangan pendidikan yaitu Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
2. P : Berapa jumlah anggaran dari setiap sumbernya.
R3 : jumlah anggaran disetiap tahun untuk BOS yaitu Rp. 1.500.000,00 per siswa BOP Rp. 40.000,00 per siswa untuk satu tahun anggaran. Untuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan dari wali siswa Rp. 40.0000,00 persiswa untuk setiap bulan?
3. P : Apa yang menjadi focus program anggaran untuk meningkatkan mutu sekolah?
R3 : kalau masalah itu wewenang kepala sekolah dalam menentukan kebijakan program, biasanya focus utama nya adalah pengadaan buku, pratikkum, pengembangan multimedia, pengembangan sarana prasarana, dan pengembangan guru.
4. P : Bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh sekolah untuk mencegah penyalahgunaan dana pendidikan?
R3 : menurut saya, pengendalian yang dilakukan di sekolah ini adalah ada 2 yaitu pengendalian internal dan eksternal. pengendalian internal dilakukan oleh ketua komite berupa laporan pertanggung jawaban kepada wali siswa dengan musyawarah, sedangkan pengendalian eksternal dilakukan oleh inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumatera Utara.
5. P : Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pengendalian pembiayaan pendidikan?
R3 : yang dilibatkan proses pengendalian tersebut adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Proses pengendalian dilakukan oleh inspektorat terkadang setiap triwulan dan terkadang setiap semester.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 4

Nama Informan : Abduh, S.Pd
Jabatan : Wakasek Sarana dan Prasarana
Hari Tanggal : 22 Maret 2022
Kode Informan : R4
Focus Penelitian : Pengendalian Pembiayaan.

1. P : bagaimana pengendalian pembiayaan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir?
R4 : Pengendalian biaya yang berasal dari pemerintah yang dilakukan di SMA negeri 1 Kualuh Hilir menggunakan sistem pengendalian internal yang diawasi oleh cabang dinas pendidikan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara
2. P : Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pengendalian Pembiayaan Internal?
R4 : Pengendalian Internal dilakukan oleh Inspektorat dan BPK Provinsi Sumatera Utara. Prioritas pengendalian internal adalah aset sekolah dan program pembiayaan sekolah oleh pengawasan cabang dinas pendidikan. Yang terlibat dalam proses pengendalian adalah kepala sekolah, bendahara, dan wakil kepala sekolah.
3. P : Bagaimana proses dan tahapan pengendalian pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan?
R4 : Proses pengendalian untuk meningkatkan mutu disekolah menggunakan tahapan pemetaan, perencanaan, evaluasi, dan penetapan standar.
4. P : apa saja yang menjadi sasaran pengendalian pembiayaan?
R4 : sasaran yang menjadi pengendalian pembiayaan adalah perencanaan pembiayaan dana BOS dilakukan oleh cabang dinas pendidikan kota Tanjung Balai sedangkan SPP dilakukan oleh komite sekolah. Selain itu mengenai aspek Sarana dan Prasarana.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 5

Nama Informan : Muhammad Redo, S.Pd
Jabatan : Guru PJOK

Hari Tanggal : 22 Maret 2022
Kode Informan : R5
Focus Penelitian : Pelaksanaan Pembiayaan

1. P : Apakah guru melakukan penyusunan perangkat pembelajaran dalam peningkatan kompetensi guru?
R5 : iya guru melakukan kompetensi perangkat pembelajaran dalam penyusunan perangkat pembelajaran yaitu RPP, Prota, Prosem dan Silabus dalam menyusun perangkat pembelajaran. Setiap penyusunan perangkat pembelajaran disusun secara bersama-sama seluruh dewan guru.
2. P : Apakah didalam perangkat pembelajaran guru memberikan nilai-nilai pancasila dan karakteristik yang baik kepada siswa?
R5 : iya guru melakukan penilaian sikap berupa sikap menghormati, gotong royong, sikap mengamalkan agama islam, dan nilai-nilai pancasila dan dituangkan kedalam RPP.
3. P : bagaimana guru melakukan penilaian kepada peserta didik yang dituangkan kedalam RPP?
R5 : Guru melakukan penilaian kepada peserta didik dengan menggunakan teknik penilaian diri, penilaian antar siswa, proyek, portofolio, dan produk.
4. P : Apakah kepala sekolah memberikan arahan penyusunan dan penilaian kepada guru?
R5 : kepala sekolah memberikan bimbingan untuk penyusunan perangkat pembelajaran kepada guru dengan memfasilitasi dan menentukan waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh wakasek Kurikulum.
5. P : Apakah Kepala Sekolah Pelatihan atau pengembangan yang dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru?
R5 : Dalam melakukan pengembangan dan pelatihan yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru adalah dengan membuat pelatihan pembuatan RPP berbasis HOTS, dan Penilaian Siswa dengan mengundang pemateri dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 6

Nama Informan : Syofian Syani, S.Pd
Jabatan : Guru Kesenian dan Kebudayaan
Hari Tanggal : 23 Maret 2022
Kode Informan : R6
Focus Penelitian : Pelaksanaan Pembiayaan

1. P : Apakah kepala sekolah memfasilitasi guru dalam peningkatan kompetensi guru?
R6 : iya, kepala sekolah memfasilitasi dan mendukung dalam mengikuti berbagai program untuk pengembangan kompetensi seperti uji kompetensi guru, pelatihan kurikulum merdeka belajar, program guru penggerak, pelatihan pengelolaan kelas, penggunaan media pembelajaran.
2. P5 : Bagaimana tindak lanjut guru setelah mengikuti program pengembangan kompetensi guru?
R5 : Bagaimana tindak lanjut guru setelah mengikuti pelatihan adalah dengan menerapkan media dalam pengelolaan kelas, dengan pembelajaran berpusat kepada murid.
3. P5 :Apakah guru melibatkan pembelajaran dan menggunakan fasilitas sekolah dalam proses pembelajaran?
R5 : guru menggunakan media bergantung kepada gurunya. Jika guru yang mengampu mata pelajaran MIPA tidak hanya alat peraga saja dan media tetapi menggunakan laboratorium seperti mata pelajaran Biologi, Fisika, Kimia.
4. P5 : bagaimana Kepala melakukan evaluasi terhadap program pengembangan guru.
R5 : kepala sekolah melakukan evaluasi setiap semester terhadap program kegiatan dengan memberikan penghargaan kepada guru berprestasi dan melakukan perbaikan program yang belum berhasil.
5. P5 : Program pengembangan apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menciptakan lulusan yang berkompetensi?
R5 : untuk melakukan pengembangan terhadap lulusan kepala sekolah memberikan program ekstrakurikuler berupa Paskibraka Kecamatan dan Kabupaten, Program Mahir menggunakan Komputer, Program Sholat Dhuha, program Lulusan berkarakter.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 7

Nama Informan : Mahadi Siregar, S.Pd.I, Gr

Jabatan : Wakasek Kurikulum

Hari Tanggal : 24 Maret 2022

Kode Informan : R6

1. P : Bagaimana perencanaan pembiayaan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir?

- R7 : Perencanaan pembiayaan dilaksanakan di awal tahun ajaran baru dengan musyawarah bersama guru dan komite sekolah.
2. P : Bagaimana pedoman pengelolaan biaya di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir?
- R7 : pengelolaan dengan menyusun perencanaan anggaran dengan musyawarah dan melakukan segala bentuk anggaran kedalam buku administrasi dan diawasi oleh kepala sekolah.
3. P : Bagaimana penetapan prosedur pengawasan pembiayaan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir?
- R7 : Kalau dari dinas itu yo selalu ada pembinaan tiap akhir bulan atau tri bulan itu ada monev (monitoring dan evaluasi) pembiayaan. Dari sekolah ya dari komite. Kepala sekolah yang dimonev, pelaksananya kan ya kepala sekolah.
4. P : Bagaimana evaluasi pembiayaan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir?
- R7 : sistem evaluasi pembiayaan pendidikan di sekolah kami dengan melihat kinerja guru yang diamanahkan mengembangkan program kegiatan yang terdapat pada RKAS, kemudian apabila program kegiatan tersebut berhasil maka akan diberikan penghargaan. Apabila laporan kinerja kegiatan tidak berhasil maka dilakukan evaluasi program dan evaluasi Sumber Daya manusia. Penilaian evaluasi pembiayaan dilakukan dengan menugaskan SDM yang memenuhi kriteria dan keberhasilannya diukur dengan penilaian kinerja guru.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 8

Nama Informan : Herman Munthe

Jabatan : Ketua Komita

Hari Tanggal : 24 Maret 2022

Kode Informan : R8

1. P : Bagaimana pendapat bapak mengenai pembiayaan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir?
- R8 : Pendapat saya mengenai pembiayaan yang dibuat oleh kepala sekolah sudah bagus ada kemajuan rehab gedung, penambahan ruang kelas, dan penyetaraan gaji guru yang bersumber dari komite sekolah. sekolah ini sudah bagus dan tertib semenjak kepemimpinan kepala sekolah bk yasma ini. Tidak banyak siswa yang berkeliaran lagi, dan banyak yang sudah berprestasi
2. P : Apakah kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap dana yang bersumber dari komite sekolah

- R8 : kepala sekolah melakukan pengawasan pendanaan yang bersumber dari komite sekolah.
3. P : Apa prioritas penggunaan dana komite sekolah?
R8 : Prioritas pendanaan yang berasal dari komite sekolah adalah untuk gaji guru, menambah kursi dan meja yang rusak, pembangunan fasilitas sekolah, dan biaya perjalanan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.
4. P : Berapa tanggungan biaya yang harus dibayar siswa setiap bulannya?
R8 : dana komite persiswa dikenakan biaya sebesar Rp. 40.000 perbulan sesuai kesepakatan.
5. P : Bagaimana pertanggungjawaban dana komite sekolah ?
R8 : Proses pertanggungjawaban dana komite adalah dengan mempertanggungjawabkan dan melaporkan dana disetiap akhir semester dibahas dalam rapat akhir semester kepada walisiswa.

Lampiran II

Data Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMA Negeri 1 Kualuh Hilir T.P 2021/2022

NO	NAMA GURU	STATUS	JABATAN
1	Yasma Ariamma Br. Guru Singa, S.Pd	PNS	Kepala Sekolah
2	Abduh, S.Pd	PNS	Wakil Bidang Humas dan Sarana Prasarana
3	Agung Chailana Putra, S.Pd	PNS	Guru PJOK
4	Aisyah, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru MM
5	Abul Qosyim Al Zunaidi, S.Pd	Guru Honor Sekolah	Guru PAI
6	Azmi Muhammad Hasibuan, S.Sos.I	Honor Daerah TK.I	Wakil Kesiswaan
7	Azmuna Wulandari, S.P.d	Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Perpustakaan
8	Eliana, S.Kom	Honor Daerah TK.I	Guru TIK
9	Emmy Patmawati Saragih, S.Pd.I	Honor Daerah TK.I	Guru Agama Kristen
10	Hendra Kurniawan, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru Sejarah Indonesia
11	Heri Iskandar Tanjung	Tenaga Honor Sekolah	Kepala Tata Usaha
12	Hujjah Hikmatul Harahap, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru Matematika
13	Juliani Tanjung, A.md	Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Administrasi

14	Khairunnisa, A.md	Guru Honor Sekolah	Guru Ekonomi
15	Kartini, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru PAI
16	M. Redho, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru PJOK
17	Mahadi Siregar, S.Pd.I	PNS	Wakil Kurikulum
18	Muhammad Syubur Syaputra, S.Sos	Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Administrasi
19	Muhammad Yusuf, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru Matematika
20	Muklis, S.E	Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Administrasi
21	Mustika Sari, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru Bahasa Indonesia
22	Nasrawati, S.Ag	Honor Daerah TK.I	Guru Ekonomi
23	Nia Audina Rambe, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru Fisika
24	Nur Evidatun Zuriah, S.Pd	Guru Honor Sekolah	Guru Geografi
25	Nur Adida Sitorus, S.S	Honor Daerah TK.I	Guru Bahasa Asing
26	Nurhayati, S.E	Honor Daerah TK.I	Guru Ekonomi
27	Romi Katini, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru Kimia
28	Sabariana Sihotang, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru Bahasa Inggris
29	Sri Hastuti, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru Matematika
30	Sukardi, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru Sejarah
31	Suriadi dalimunthe, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru PKn
32	Swagiantini, S.Pd	Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Administrasi

33	Syafrida Aini Sibarani, S.Pd	Guru Honor Sekolah	Guru Matematika
34	Syopian Syani, S.Pd	PNS	Guru Seni Budaya
35	Teti Susanti Sagala, S.Pd	Honor Daerah TK.I	Guru Bahasa Inggris
36	Ulfa Sari, S.Pd	PNS	Guru BK
37	Warda Siregar, S.Pd	Guru Honor Sekolah	Guru Biologi
38	Yusrianti Rambe, S.Pd.I	Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Administrasi
39	Abdul Halim	PNS	Bendahara
40	Muklis	Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Keamanan Sekolah
41	Halimahtus Sakdiah, S.Pd	Guru Honor Sekolah	Guru Matematika

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI



Gambar 1. Halaman Depan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir



Gambar 2. Halaman Pendopo SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir



Gambar 3. Ruang Kelas Unggulan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir



Gambar 4. Guru dan Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir



Gambar 5. Perpustakaan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir



Gambar 6. Peneliti dengan Ketua Komite



Gambar 7. Mushollah dan Ruang Tata Usaha



Gambar 8. Laboratium MIPA



Gambar 9. Suasana Ruang Kepala Sekolah dan Laboratorium Komputer



Gambar 10. Taman SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama : Muhammad Yusuf

Tempat dan Tanggal lahir : Pasar Bilah, 01 Juni 1993

Alamat : Pasar Bilah II A Kelurahan
Kampung Mesjid
Kecamatan Kualuh Hilir
Kabupaten Labuhanbatu
Utara

Nomor Handphone : 082185017697

Status : Belum Menikah

Email : muhammad4d.josep@gmail.com

Agama : Islam

Negara : Indonesia

Ayah : Sukirman

Ibu : Suweni



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri 117969 Pasar Bilah tahun 2000 - 2006
- SMP Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir 2006 – 2009
- SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir 2009 – 2012
- Jurusan Pendidikan Matematika FKIP UMSU 2012 – 2016
- Magister Manajemen Pendidikan Tinggi UMSU 2020 – 2022

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- Wakil Ketua Karang Taruna Kecamatan Kualuh Hilir 2021 - 2025
- Sekretaris Koordinator Kecamatan Kualuh Hilir DPD PKB Puja Kesuma Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021 – 2025

- Anggota Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Ketua Pemuda Persatuan Islam Kecamatan Kualuh Hilir
- Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Anggota Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (GPLH) Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Ketua Bidang Pendidikan Majelis Dakwah Indonesia (MDI) Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Anggota Federasi Arum Jeram Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Utara

D. RIWAYAT PEKERJAAN

- Guru Matematika SMAP Negeri 2 Pasir Limau Kapas Rokan Hilir 2016-2017
- Guru Matematika SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara 2017 – Sekarang
- Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kualuh Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<http://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 519/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2022
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Medan, 16 Sya'ban 1443 H
19 Maret 2022 M

Kepada Yth :
SMA NEGERI 1 KUALUH HILIR
di
Tempat.-

Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme serta intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya dapat diberikan izin kepada Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD YUSUF**
NPM : 2020060051
Prodi : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
Judul Tesis : MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI SMA NEGERI 1 KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.



Direktur,

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

C.c File





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<http://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tumblr.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 519/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2022
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Medan, 16 Sya'ban 1443 H
19 Maret 2022 M

Kepada Yth :
SMA NEGERI 1 KUALUH HILIR
di
Tempat.-

Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme serta intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya dapat diberikan izin kepada Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD YUSUF**
NPM : 2020060051
Prodi : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
Judul Tesis : MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI SMA NEGERI 1 KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.



Direktur,

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

C.c File





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS TANJUNGBALAI
SMA NEGERI 1 KUALUH HILIR

Jalan Pasar Bilah Kampung MesjidKel. Kampung MesjidKec. KualuhHilirKode Pos 21474
Email : smakualuhhilir@yahoo.co.id
LABUHANBATU UTARA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/057-TU/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YASMA ARIAMMA BR GURUSINGA, S.Pd
Jabatan : Plt Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMA Negeri 1 Kualuh Hilir
Alamat sekolah : Jl. Pasar Bilah, Kel. Kampung Mesjid, Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu
Utara, Sumatera Utara.

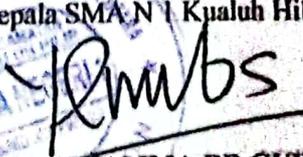
Dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama : MUHAMMAD YUSUF,S.Pd
NPM : 2020060051
Prodi : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
Judul Tesis : MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN (STUDI SMA NEGERI 1 KECAMATAN KUALUH
HILIR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA).

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di SMA NEGERI 1 KUALUH HILIR
pada Tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan Tanggal 30 Maret 2022.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,
Terima kasih.

Kampung Mesjid, 30 Maret 2022
Plt Kepala SMA N 1 Kualuh Hilir


YASMA ARIAMMA BR GURUSINGA, S.Pd

Penata

NIP : 19740713 201001 2 004